

**ANALISIS DETERMINASI KUALITAS LAPORAN  
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JEPARA**

Skripsi  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat S1

Program Studi Akuntansi



**Disusun Oleh :**

**Alvin Bahar Zaqqish Shifa'**

**NIM : 31401800018**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEMARANG**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

### ANALISIS DETERMINASI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

Disusun Oleh:

Alvin Bahar Zaqqish Shifa'

Nim : 31401800018

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian usulan penelitian untuk skripsi Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 28 November 2023

Pembimbing,



Dr. Kiryanto, SE., M.Si., Akt., CA

NIK. 211492004

## HALAMAN PERSETUJUAN

### Analisis Determinasi Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara

**Disusun oleh :**

Alvin Bahar Zaqqish Shifa'

NIM : 31401800018

Telah dipertahankan didepan penguji

Pada tanggal 28 November 2023

Pembimbing,



Dr. Kiryanto, SE., M.Si., Akt., CA

NIK. 211492004

Penguji I

Penguji II

Dr. Lisa Kartikasari, SE, Msi, Ak, CA

Hani Werdi Aprianti, SE, Msi, Ak, CA

NIK.211402010

NIK.211414026

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Semarang,

Ketua Program Studi Akuntansi

Provita Wijayanti, S.E., M.si., Ak., CA

NIK. 211403012

## HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Alvin Bahar Zaqqish Shifa'

NIM : 31401800018

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul “Analisis Determinasi Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara” merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur *plagiarism* dengan cara yang tidak sesuai etika atau tradisi keilmuan. Peneliti siap menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam proposal penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini peneliti buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 November 2023

Yang membuat pernyataan,

Alvin Bahar Zaqqish Shifa'

NIM. 31401800018

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kelancaran dalam proses pengerjaan, sehingga sampai saat ini penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS DETERMINASI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JEPARA” dengan baik. Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi mendapat bimbingan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

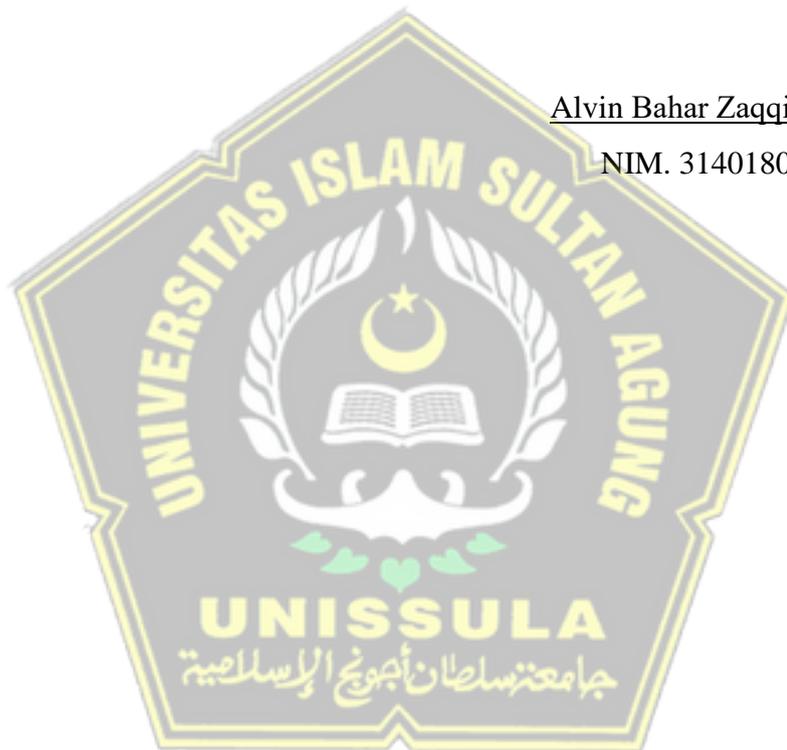
1. Allah SWT
2. Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Provita Wijayanti S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Kiryanto SE., M.Si., Akt., CA selaku Dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi yang telah membimbing dengan baik dan memberi masukan sehingga penelitian yang dilakukan membuahkan hasil yang maksimal.
5. Kedua orang tua yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi agar selalu semangat dan pantang menyerah dalam penyusunan skripsi ini.
6. Diri saya sendiri yang tidak pernah lelah dan putus asa dalam menyusun skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman yang selalu membantu dan disampingku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu menyelesaikan penyusunan proposal ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena adanya keterbatasan, dan lain hal. Semoga apa yang penulis sampaikan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan Demi kelancaran dan perbaikan penelitian, untuk itu peneliti mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penelitian ini.

Semarang, 28 November 2023

Alvin Bahar Zaqqish Shifa'

NIM. 31401800018

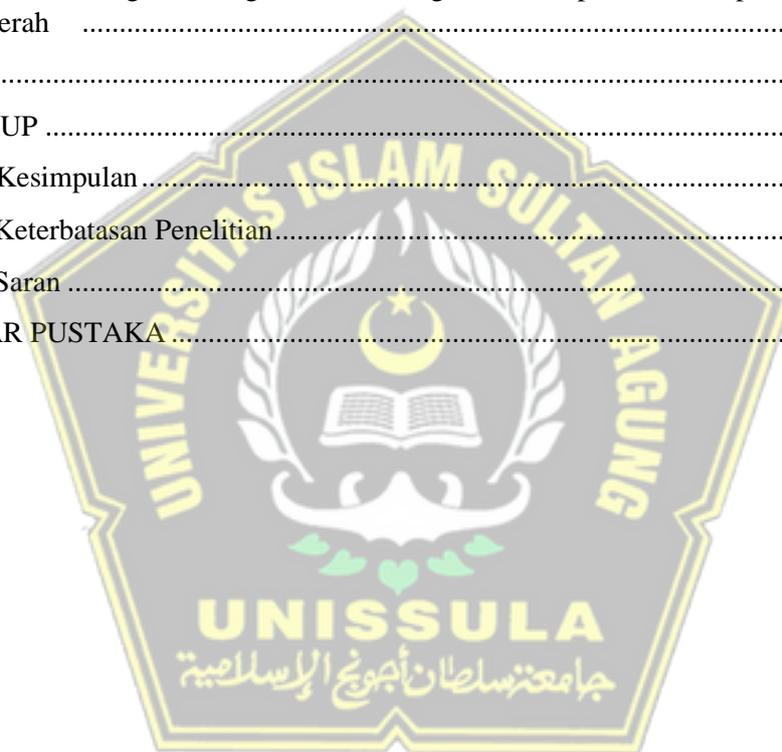


## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
BAB II.....	9
KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1 Teori Stewardship ( <i>Stewardship theory</i> ).....	9
2.2 Variabel Penelitian.....	10
2.2.1. Laporan Keuangan.....	10
2.2.2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	13
2.2.3. Sistem Pengendalian Intern.....	16
2.2.4. Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	19
2.2.5. Pemanfaatan Teknologi Informasi .....	21
2.2.6. Pengawasan keuangan.....	22
2.3 Penelitian Terdahulu .....	24
2.4 Pengembangan Hipotesis .....	35
2.4.1. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.....	35
2.4.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	36
2.4.3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.....	37

2.4.4.	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.....	38
2.4.5.	Pengaruh Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	39
2.5	Kerangka Pemikiran Teoritis .....	40
BAB III	.....	41
METODE PENELITIAN.....		41
3.1	Jenis Penelitian.....	41
3.2	Populasi dan Sampel .....	41
3.3	Sumber dan Jenis Data.....	42
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	42
3.5	Definisi Operasional Variabel dan Indikator .....	43
3.5.1.	Variabel.....	43
3.5.2.	Indikator .....	45
3.6	Metode Analisis Data.....	46
3.6.1.	Uji Validitas .....	46
3.6.2.	Uji Reabilitas .....	46
3.6.3.	Uji Asumsi Klasik.....	47
3.6.4.	Analisis Uji Hipotesis .....	48
3.6.5.	Koefisien Determinasi.....	48
BAB IV	.....	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		49
4.1	Deskripsi Respoden .....	49
4.1.1.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	49
4.2	Statistik Deskriptif .....	52
4.2.1.	Analisis Deskriptif Variabel.....	53
4.3	Analisis data.....	61
4.3.1.	Uji Validitas .....	61
4.3.2.	Uji Reliabilitas .....	64
4.3.3.	Uji Asumsi Klasik.....	65
4.3.4.	Analisis Regresi Linier Berganda .....	68
4.3.5.	Uji Hipotesis .....	70
4.3.6.	Uji Determinasi ( $R^2$ ) .....	74

4.4	Pembahasan Hasil Penelitian .....	75
4.4.1.	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.....	75
4.4.2.	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.....	76
4.4.3.	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.....	76
4.4.4.	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.....	77
4.4.5.	Pengaruh Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah .....	78
BAB V	.....	80
PENUTUP	.....	80
5.1	Kesimpulan.....	80
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	81
5.3	Saran .....	81
DAFTAR PUSTAKA	.....	82

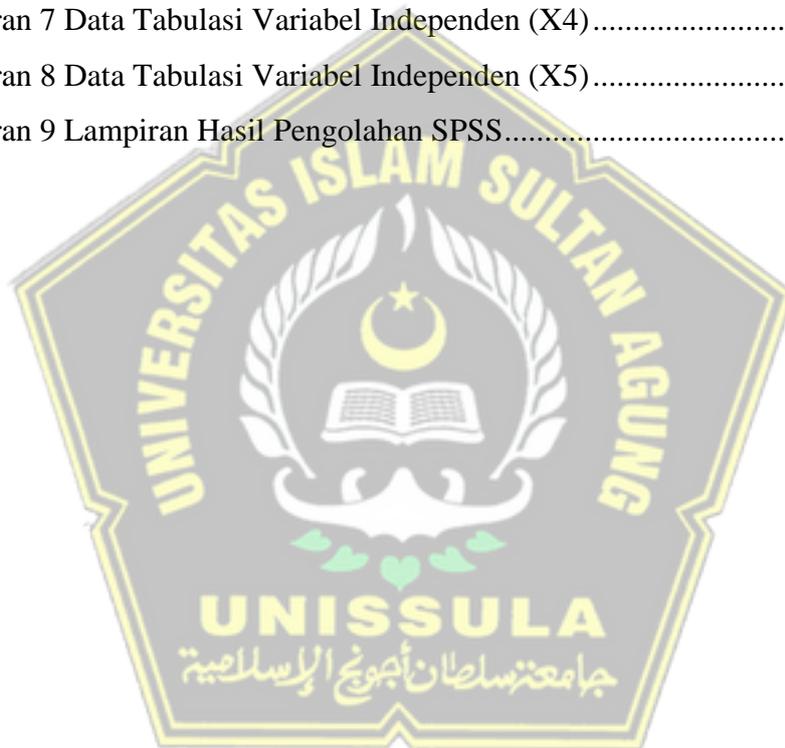


## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	24
Tabel 3.1 Indikator Penelitian .....	45
Tabel 4.1 Penyebaran Kuisisioner .....	49
Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	50
Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Usia.....	50
Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	51
Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan .....	51
Tabel 4.6 Statistik Deskripsif .....	52
Tabel 4. 7 Tanggapan Responden Variabel Kualitas Laporan Keuanagn Daerah	55
Tabel 4. 8 Tanggapan Responden Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	56
Tabel 4. 9 Tanggapan Responden Variabel Sistem Pengendalian Intern .....	57
Tabel 4. 10 Tanggapan Responden Variabel Kompetensi SDM .....	58
Tabel 4. 11 Tanggapan Responden Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi.	59
Tabel 4. 12 Tanggapan Responden Variabel Pengawasan Keuangan .....	60
Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas.....	61
Tabel 4.14 Hasil Uji Reliabilitas.....	64
Tabel 4.15 Hasil Uji Normalitas .....	65
Tabel 4.16 Uji Normal P-Plot .....	66
Tabel 4. 17 Uji Heterokedastisitas .....	67
Tabel 4. 18 Uji Multikolinieritas.....	68
Tabel 4.19 Analisis Regresi Linier Berganda .....	69
Tabel 4.20 Hasil Uji Parsial (Uji t) .....	71
Tabel 4.21 Uji Simultan (Uji f) .....	73
Tabel 4.22 Uji Determinasi ( $R^2$ ) .....	74

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pemberian Ijin Riset.....	85
Lampiran 2 Lampiran Kuisisioner.....	86
Lampiran 3 Data Tabulasi Variabel Dependen (Y) .....	95
Lampiran 4 Data Tabulasi Variabel Independen (X1).....	98
Lampiran 5 Data Tabulasi Variabel Independen (X2).....	101
Lampiran 6 Data Tabulasi Variabel Independen (X3).....	104
Lampiran 7 Data Tabulasi Variabel Independen (X4).....	107
Lampiran 8 Data Tabulasi Variabel Independen (X5).....	110
Lampiran 9 Lampiran Hasil Pengolahan SPSS.....	113



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Menurut peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 8 tahun 2006 dalam (Riandani, 2017) Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas laporan keuangan harus memenuhi kriteria yang memadai yaitu memiliki relevansi, dapat diandalkan, dapat dinilai atau dibandingkan, dan dapat dipahami. Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan daerah adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan pemerintah terdiri dari 7 komponen yaitu laporan realisasi anggaran(LRA), neraca, laporan perubahan saldo(LP SAL), laporan operasional(LO), laporan perubahan ekuitas(LPE), laporan arus kas(LAK), catatan atas laporan keuangan(CaLK). Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Menurut data dari [bpkad.jepara.go.id](http://bpkad.jepara.go.id) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Pemerintah daerah

Kabupaten Jepara merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yang sampai saat ini masih mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyajian laporan keuangan (Koran Jepara Terkini (Online)). Sejak 5 tahun terakhir dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 laporan hasil pemeriksaan terhadap LKPD pemerintah kota Jepara oleh BPK-RI perwakilan provinsi Jepara memberikan opini WTP 5 kali berturut-turut. Namun, predikat WTP tersebut masih menyisakan berbagai permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti seperti yang dikutip dari berbagai media online yang mengemukakan temuan sebagai berikut ini: Pertama, pelanggaran ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tahun 2019 perihal Pemungutan Pajak Air Tanah tidak berdasarkan volume sebenarnya dan tidak mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 sehingga mengakibatkan Pemkab Jepara berpotensi kehilangan pendapatan Pajak Air Tanah sebesar Rp3,38 miliar. Kedua, Kekurangan volume pekerjaan atas delapan paket pekerjaan pada RSUD R.A. Kartini Jepara, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR sebesar Rp.537,35 juta.

Dari fenomena diatas, walaupun pemerintah kota Jepara mendapatkan opini WTP 5 kali berturut-turut dari BPK. Kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah Jepara belum sepenuhnya memenuhi kualitas laporan keuangan pemerintah seperti yang dicantumkan dalam karakteristik kualitatif dalam peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2005 dalam (Riandani, 2017) tentang standart akuntansi pemerintah (SAP), diantaranya relevansi, dapat diandalkan, dapat dinilai, atau dibandingkan, dan dapat dipahami. Misalnya, informasi yang termuat di dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna dalam membantu mereka mengevaluasi periode masa lalu atau periode masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu, bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain

pada umumnya, dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna. Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan antara lain, sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan serta kinerja pemerintah, agar supaya laporan keuangan dan kinerja pemerintah yang dimaksud dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Mokoginta et al., 2021). Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu sistem akuntansi yang di dalamnya terdapat proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan dan laporan keuangan dalam wujud melaksanakan APBD, yang dilakukan dalam berbagai prinsip akuntansi yang sudah diterima secara umum. Sistem akuntansi keuangan daerah dibentuk untuk memberikan beragam informasi keuangan yang dibutuhkan untuk perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, serta penilaian performa pemerintah (Mokoginta et al., 2021).

Faktor pendukung lain untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah adalah sistem pengendalian intern. LKPD harus disusun berdasarkan sistem pengendalian internal seperti yang diamanatkan dalam pasal 56 ayat (4) UU nomor 01 tahun 2004 yang berisi tentang pengelolaan dana APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Tingginya kualitas LKPD juga ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internal yang dimiliki institusi Pemerintah Daerah. Pengendalian internal yang lemah menyebabkan sulitnya mendeteksi kecurangan/ketidakakuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang

diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten (Tawaqal & Suparno, 2017). Keefektifan sistem pengendalian internal diperlukan untuk merencanakan dan melaporkan hasil yang akan dievaluasi oleh komite sistem pengendalian internal. Fungsi sistem pengendalian internal digunakan sebagai sumber informasi yang independen mengenai berbagai aktivitas organisasi agar dapat membantu pengambilan keputusan yang obyektif dan akuntabel. Komponen-komponen pengendalian intern terdiri dari Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*), Penilaian Risiko (*Risk Assessment*), Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*), Informasi Dan Komunikasi, Pemantauan (*Monitoring*). Hal ini berbeda di setiap lembaga. Misalnya sistem pengendalian internal di Pemerintah Daerah berbeda dengan sistem pengendalian internal di bank.

Kompetensi sumber daya manusia juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan kompetensi sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi yang baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang diterapkan pemerintah. (Tawaqal & Suparno, 2017)

Faktor lain yang juga ikut mempengaruhi baik buruknya kualitas laporan keuangan adalah dukungan pemanfaatan teknologi informasi. Menurut (Riandani, 2017) teknologi merupakan alat yang digunakan individual dalam penyelesaian tugas mereka, dalam konteks sistem informasi, teknologi terkait dengan sistem komputer (perangkat keras, perangkat lunak, data) dan penggunaan jasa pendukung (training) yang memberikan panduan penggunaan dalam menyelesaikan tugas. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah tentang Informasi Keuangan Daerah yang menggantikan PP No.11 tahun 2001 tentang informasi keuangan daerah. Komputer telah menggantikan teknologi manual dengan melakukan pemrosesan atas data yang jumlahnya sangat besar, ataupun menjalankan pekerjaan yang sangat kompleks. Komputer juga dapat bekerja sangat konsisten serta reliable (dapat dipercaya) dalam waktu yang lebih cepat bila dibandingkan dengan kemampuan manusia. Dukungan penggunaan teknologi informasi ini juga membantu mempercepat proses penyampaian dan pemahaman informasi, khususnya dalam mengantisipasi intensitas perubahan-perubahan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang sering terjadi. Meskipun adanya perubahan laporan keuangan yang sebelumnya Cash Basis menjadi akrual basis. Pemerintah seharusnya menjadikan ini sebagai tantangan agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri (Riandani, 2017).

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pengawasan keuangan (Pura, 2021). Pengawasan keuangan daerah adalah suatu kegiatan untuk menjamin agar pelaksanaan pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Tujuan dari pengawasan keuangan negara/daerah adalah : (1) untuk menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dapat dijalankan, (2) untuk menjaga agar kegiatan penerimaan dan pembelanjaan pengeluaran negara/daerah sesuai dengan anggaran yang telah digariskan dan (3) untuk menjaga agar pelaksanaan APBN/APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan (Pura, 2021).

Semakin baik pengawasan atas pengelolaan keuangan negara/daerah semakin meningkat kualitas informasi dalam penyajian laporan keuangan.

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Nilawati et al., 2021) dengan hasil Kualitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan (PURA, 2021), (Pujanira & Taman, 2017), (Mulia, 2019), (Tawaqal & Suparno, 2017), (Irafah et al., 2020), (Oktavia & Rahayu, 2018).

Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mokoginta et al., 2021) penelitian tersebut menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh negative signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Dan juga penelitian dari (Riandani, 2017) yang menunjukkan hasil bahwa Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan kemudian didukung oleh (Sa'adah & Nasrullah, 2021) dengan hasil penelitian kurang lebih sama menunjukkan bahwa secara parsial Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi justru Secara parsial variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari uraian penjelasan penelitian terdahulu di atas, terdapat adanya perbedaan hasil penelitian. Hal tersebut memicu adanya *research gab* yang menjadi motivasi penelitian ini dibuat. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk mengembangkan penelitian terdahulu dengan harapan dapat

mengembangkan penelitian sebelumnya. Untuk itu peneliti mangusung judul “ANALISIS DETERMINASI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JEPARA”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di atas maka dapat dirumuskan masalah berikut ini :

1. Bagaimanakah pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
2. Bagaimanakah pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
3. Bagaimanakah pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
4. Bagaimanakah pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
5. Bagaimanakah pengaruh pengawasan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan daerah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas keuangan daerah
2. Mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas keuangan daerah
3. Mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas keuangan daerah
4. Mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah
5. Mengetahui pengaruh pengawasan keuangan terhadap keualitas laporan keuangan daerah?

#### 1.4 Manfaat Penelitian

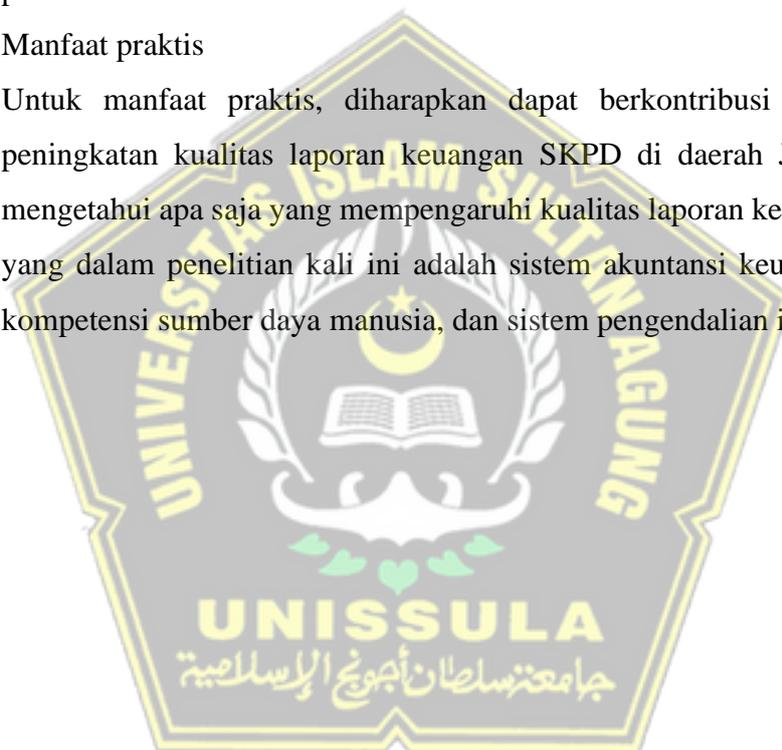
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat akademik

Dalam sektor akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai bahan atau referensi bagi penelitian selanjutnya tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat praktis

Untuk manfaat praktis, diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan SKPD di daerah Jepara dengan mengetahui apa saja yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah yang dalam penelitian kali ini adalah sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Teori Stewardship (*Stewardship theory*)

*Stewardship theory* (Donaldson dan Davis, 1991), menjelaskan bahwa para manajemen berfokus terhadap tujuan utama yaitu kepentingan sebuah organisasi. Dimana teori ini menggambarkan adanya hubungan yang erat antara kepuasan dan kesuksesan sebuah organisasi. Dengan tercapainya sebuah kesuksesan dalam organisasi maka akan tercapai pula pemaksimalisasi utilitas principals dan manajemen. Dengan ini teori *stewardship* dapat diterapkan pada sebuah penelitian akuntansi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya. (Richard Oliver (dalam Zeithaml., 2021)). Secara prinsip akuntansi merupakan alat pengendalian diri, sebagai sarana pelaporan aktivitas manajer atas pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan. Dengan adanya keterbatasan, pemilik sumber daya menyerahkan amanah pengelolaan sumber daya kepada pihak lain (*stewards/manajemen*) yang lebih siap. Kontrak hubungan antara principals dengan stewards didasari dengan kepercayaan, kolektif sesuai dengan tujuan organisasi. *Stewardship theory* merupakan model yang dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik.

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

Dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah manfaat ke teori *stewardship* yaitu lebih berkualitas, berdasarkan teori ada hubungan positif antara kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan teori *Stewardship*. Pemerintah yang bertindak sebagai manager mempunyai

keajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

## **2.2 Variabel Penelitian**

### **2.2.1. Laporan Keuangan**

#### **1. Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah laporan yang berisi data transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu yang mana laporan tersebut harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sebagai pembahasan evaluasi untuk perkembangan usaha ke depan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan daerah adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan memiliki berbagai macam komponen yaitu terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan (Tawaqal & Suparno, 2017).

#### **2. Kualitas Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan daerah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (SPAP) No.1 menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan menjadi alat

yang digunakan untuk menunjukkan capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu entitas (Mokoginta et al., 2021).

Sedangkan menurut (Riandani, 2017) Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggung jawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi.

### 3. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut (Mokoginta et al., 2021) Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- 1) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
- 2) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

#### 4. Karakteristik

Karakteristik laporan keuangan adalah segala ukuran normatif yang harus diwujudkan dalam sistem informasi akuntansi untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Laporan informasi keuangan ini merupakan suatu entitas yang bisa menggambarkan kinerja entitas tersebut disuatu periode tertentu. Adapun beberapa karakteristik laporan keuangan yang harus dipenuhi dalam membuat laporan keuangan adalah sebagai berikut (Mokoginta et al., 2021) :

##### a. Relevan

Laporan keuangan biasanya dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

##### b. Andal

Laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila informasi-informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara, jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

##### c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ketahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan

kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

### **2.2.2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

#### **1. Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Menurut (Mokoginta et al., 2021) akuntansi keuangan daerah adalah Suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (Provinsi, kabupaten, Kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Dari pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan sistem akuntansi yang terdiri dari seperangkat kebijakan, standard dan prosedur yang dapat menghasilkan laporan yang relevan, andal dan tepat waktu untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi. Sehingga dimensi dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terdiri dari : (1)Kebijakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), (2)Prosedur

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), (3) Sistem Akuntansi Sumber Daya Manusia, (4) Sistem Teknologi Informasi.

## 2. Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

(Mokoginta et al., 2021) Menjelaskan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi selain kas, dan akuntansi asset, dan disempurnakan oleh permendagri menjadi 5 prosedur sistem akuntansi keuangan daerah yang meliputi sebagai berikut :

### 1) Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

### 2) Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan/atau SKPKD.

### 3) Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah

Prosedur akuntansi asset adalah serangkaian proses, baik manual maupun komputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitas, penghapusan, pemindahan tangan, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap asset yang dikuasai/digunakan SKPD atau SKPKD. Prosedur akuntansi asset digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan asset yang dikuasai/digunakan SKPD atau SKPKD.

#### 4) Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur akuntansi selain kas adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

#### 5) Penyajian Laporan Keuangan

Tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.

### 3. Sistem Pencatatan

#### 1) Single Entry

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sistem pencatatan single entry dilakukan oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik di level SKPD maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Sistem ini hanya sebagai alat kontrol sistem akuntansi yang sebenarnya yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

#### 2) Double Entry

Sistem pencatatan *double entry* Sering juga disebut sebagai sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah *menjurnal*. Persamaan dasar akuntansi tersebut berbentuk sebagai berikut:

$$\mathbf{AKTIVA + BELANJA = UTANG + EKUITAS DANA + PENDAPATAN}$$

Transaksi yang berakibat bertambahnya aktiva akan dicatat pada sisi debit sedangkan yang berakibat berkurangnya aktiva akan dicatat pada sisi kredit. Hal yang sama dilakukan untuk mencatat belanja. Hal yang

sebaliknya dilakukan untuk utang, ekuitas dana, dan pendapatan. Apabila suatu transaksi mengakibatkan bertambahnya utang, maka pencatatan akan dilakukan pada sisi kredit, sedangkan jika mengakibatkan berkurangnya utang, maka pencatatan dilakukan pada sisi debit. Hal serupa ini dilakukan untuk ekuitas dana dan pendapatan.

### 3) Triple Entry

Sistem pencatatan *triple entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Komponen Laporan Keuangan berdasarkan PP 71 tahun 2010 yaitu: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), (3) Neraca, (4) Laporan Arus Kas, (5) Laporan Operasional, (6) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan.

## 2.2.3. Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian internal adalah metode, proses, dan kebijakan yang didesain oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektifitas operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Mokoginta et al., 2021).

### 1. Komponen-Komponen Sistem Pengendalian Intern

Menurut *Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission*(COSO). Pengendalian Internal satuan usaha terdiri atas komponen-komponen berikut:

### 1) Lingkungan pengendalian intern

Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal atau merupakan fondasi dari komponen lainnya. Meliputi beberapa faktor meliputi:

- a. Integritas dan Etika
- b. Komitmen untuk meningkatkan kompetensi
- c. Dewan komisaris dan Komite audit
- d. Filosofi manajemen dan jenis operasi
- e. Struktur organisasi
- f. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

### 2) Penaksiran risiko

Terdiri dari identifikasi risiko. Identifikasi risiko meliputi pengujian terhadap faktor-faktor eksternal seperti pengembangan teknologi, persaingan, dan perubahan ekonomi. Faktor internal diantaranya kompetisi karyawan, sifat dari aktivitas bisnis, dan karakteris ter pengolahan sistem informasi. Sedangkan analisis risiko meliputi kemungkinan terjadinya risiko dan bagaimana mengelola risiko.

### 3) Informasi dan komunikasi

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang mencakup sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas untuk asset, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal. Komunikasi yang mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dari tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan

#### 4) Aktivitas pengendalian

Terdiri dari kebijakan dan prosedur yang menjamin karyawan melaksanakan arahan manajemen. Aktivitas pengendalian meliputi review terhadap sistem pengendalian, pemisahan tugas, dan pengendalian terhadap sistem informasi. Pengendalian terhadap sistem informasi meliputi dua cara yaitu *General Controls*, mencakup kontrol terhadap akses, perangkat lunak, dan *system development dan Application controls*, mencakup pencegahan dan deteksi transaksi yang tidak terotorisasi. Berfungsi untuk menjamin *completeness, accuracy, authorization and validity* dari proses transaksi.

#### 5) Pemantauan

Suatu tanggung jawab manajemen yang penting adalah membangun dan memelihara pengendalian internal. Manajemen memantau pengendalian internal untuk mempertimbangkan apakah pengendalian tersebut dimodifikasi sebagaimana mestinya jika perubahan kondisi menghendakinya. Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi.

## 2. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan, karena dengan adanya sistem pengendalian internal diharapkan semua yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Menurut (Qisthinia, 2016) “Tujuan Sistem Pengendalian Internal” adalah :

#### 1) Menjaga kekayaan organisasi.

Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau hancur karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang memadai. Begitu juga dengan kekayaan

perusahaan yang tidak memiliki wujud fisik seperti piutang dagang akan rawan oleh kekurangan jika dokumen penting dan catatan tidak dijaga.

2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

Manajemen memerlukan informasi keuangan yang diteliti dan andal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Banyak informasi akuntansi yang digunakan oleh manajemen untuk dasar pengambilan keputusan penting. Pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan andal karena data akuntansi mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan.

3) Mendorong efisiensi.

Pengendalian internal ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien.

4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur. Pengendalian internal ini ditujukan untuk memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan.

Untuk mencapai kegunaan dan tujuan pengendalian internal di atas maka diperlukan adanya sistem informasi akuntansi yang benar hal ini dapat memberikan bantuan yang utama terhadap kekayaan perusahaan dengan cara penyelenggaraan pencatatan aktiva yang baik. Apabila struktur pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka akan timbul kesalahan, ketidakakuratan, serta kerugian yang cukup besar bagi perusahaan (Qisthinia, 2016).

#### **2.2.4. Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Kompetensi diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, sikap, dan kemampuan. Kompetensi juga merupakan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan (Irafah et al., 2020).

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dalam lingkungan pekerjaannya. Tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan untuk kategori baik atau rata-rata. Penentu ambang kompetensi yang dibutuhkan tentunya akan dapat dijadikan dasar bagi proses seleksi, suksesi, suksesi perencanaan, evaluasi kinerja, dan pengembangan Sumber Daya Manusia (Kadek Desiana Wati dkk : 2015).

Menurut (Mulia, 2019) Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Menurut (Mulia, 2019) dalam Hutapea dan Thoah (2008:28) mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang, kemampuan, dan perilaku individu.

1. Pengetahuan (*knowledge*) adalah informasi yang dimiliki seseorang karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai bidang yang digelutinya, misalnya bahasa komputer. Pengetahuan karyawan turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, karyawan yang mempunyai pengetahuan yang cukup meningkatkan efisiensi perusahaan.
2. Keterampilan (*skill*) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seseorang karyawan dengan baik dan maksimal, misalnya seorang programer computer.

Disamping pengetahuan dan kemampuan karyawan, hal yang paling perlu diperhatikan adalah sikap perilaku karyawan.

3. Sikap (*attitude*) merupakan pola tingkah laku seseorang karyawan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan. Apabila karyawan mempunyai sifat mendukung pencapaian organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan sebaik-baiknya.
4. Kompetensi *knowledge, skill, dan attitude* cenderung lebih nyata (*visible*) dan relatif berada di permukaan (ujung) sebagai karakteristik yang dimiliki manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan kemauan untuk melakukan sebuah tugas dengan kinerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan.

#### **2.2.5. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Sebuah gambaran umum setiap teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan dan menyampaikan informasi disebut teknologi informasi. Teknologi informasi mencakup (*mainframe, mini, micro*) perangkat lunak (*software*), database, jaringan, (internet, intranet), *elektronik, comerce* dan jenis teknologi lainnya (Karyadi, 2019) dalam (Ridzal et al., 2022) Teknologi informasi berkembang pesat dan kita sudah merasakan efeknya, seperti mudahnya mendapatkan informasi melalui telepon genggam atau internet. Teknologi informasi merupakan perpaduan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. (Ridzal et al., 2022)

Menurut Widyaningrum (2010) dalam (Riandani, 2017) Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya :

1. Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik.
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Menurut Harifan (2009) dalam (Riandani, 2017), pemanfaatan teknologi informasi adalah tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi yang terdiri dari:

1. Bagian ekonomi/keuangan memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas.
2. Jaringan internet telah terpasang di unit kerja.
3. Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.
4. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.
5. Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software sesuai dengan peraturan perundangundangan.
6. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem yang terintegrasi.
7. Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur.
8. Peralatan yang usang/rusak di data dan diperbaiki tepat pada waktunya.

Penggunaan teknologi informasi yang tepat akan bisa mendukung terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian yang dilakukan (Mustafa.,2011) dalam memberikan bukti adanya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pada laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi salah satunya yaitu ketepatan- waktuan.

#### **2.2.6. Pengawasan keuangan**

Pengawasan merupakan suatu rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD wujudnya adalah dengan melihat, mendengar, dan mencermati pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh SKPD, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk ke

ranah pengawasan yang bersifat teknis. Apabila ada dugaan penyimpangan, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Memberitahukan kepada Kepala Daerah untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Pengawas Internal.
- b) Membentuk pansus untuk mencari informasi yang lebih akurat.
- c) Menyampaikan adanya dugaan penyimpangan kepada instansi penyidik (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) (Inayati & Reuni, 2018).

Menurut Pura, (2021) Pengawasan anggaran meliputi seluruh siklus anggaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban. Secara sederhana pengawasan anggaran merupakan proses pengawasan terhadap kesesuaian perencanaan anggaran dan pelaksanaannya dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan perlu dilakukan, hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan publik yang terkait dengan siklus anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi pada prioritas publik. Namun sebelum sampai pada tahap pelaksanaan, anggota dewan harus mempunyai bekal pengetahuan mengenai anggaran sehingga nanti ketika melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, anggota dewan telah dapat mendeteksi apakah ada terjadi kebocoran atau penyimpangan alokasi anggaran. indikator yang digunakan dalam Pengawasan Keuangan Daerah adalah :

1. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
2. Evaluasi kegiatan Inayati
3. Pencatatan transaksi berdasarkan bukti
4. Pencatatan transaksi yang tepat waktu
5. Dokumentasi bukti transaksi
6. Sistem pengawasan pelaksanaan tugas
7. Laporan keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian “Analisis Determinasi Kualitas Laporan Keuangan Daerah” terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Penulis dan Tahun	Variabel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	(Novtania Mokoginta, Linda Lambey, Winston Pontoh, 2017)	Variabel independen : 1. Sistem pengendalian internal 2. Sistem akuntansi keuangan daerah Variabel dependen : 1. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Objek : BPKAD Bolaang Mongondow Utara.	Pendekatan kuantitatif, Analisis regresi linear berganda	Sistem Pengendalian Intern berpengaruh negative signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
2.	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada	(Rizki Afri Mulia 2018)	Variabel independen : 1. kompetensi SDM 2. Sistem Pengendalian Intren 3. Faktor eksternal Variabel dependen :	Analisis deskriptif dan kuantitatif  Analisis regresi berganda	Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat)		<p>1. Kualitas laporan keuangan</p> <p>Objek : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Pasaman barat</p>		<p>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.</p>
3.	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen	(Nilawati. Naz'aina. Muhammad Haykal 2021)	<p>Variabel independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas SDM</li> <li>2. Pemanfaatan teknologi informasi</li> <li>3. Sistem akuntansi keuangan daerah</li> <li>4. Sistem pengendalian internal</li> </ol> <p>Variabel dependen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas laporan keuangan daerah</li> </ol> <p>Objek : Organisasi Pemerintah Daerah (DINAS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.</p>	<p>Uji PLS (Partial Least Square)</p> <p>Analisa outer model</p> <p>Analisa Goodness of fit Model</p>	<p>Kualitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen</p> <p>Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen</p> <p>Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh</p>

					<p>Positif dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen</p> <p>Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen</p> <p>Sistem Pengendalian Internal Mampu Memoderasi pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen</p> <p>Sistem Pengendalian Internal Mampu Memoderasi pengaruh</p>
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

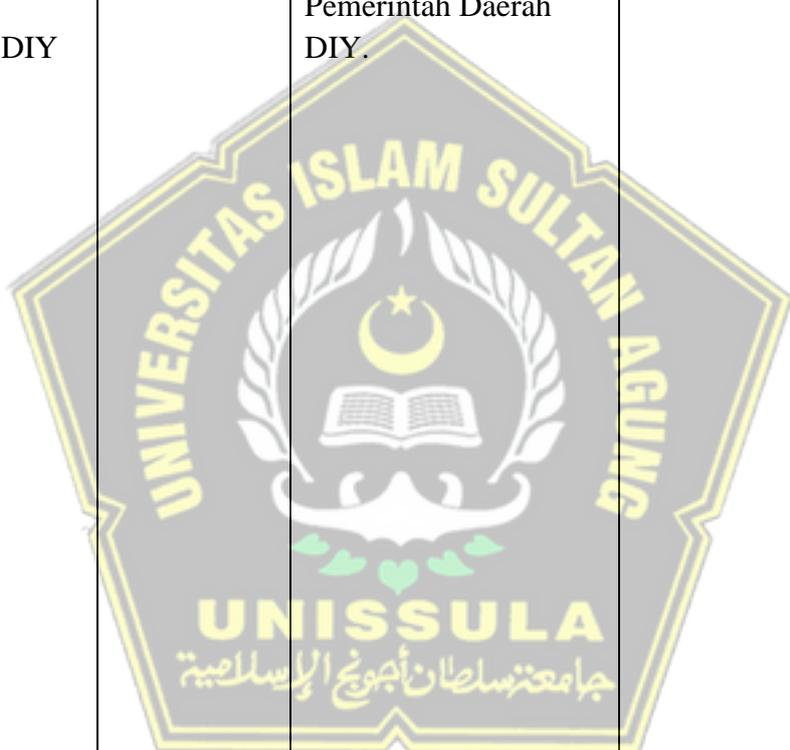


					<p>Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen</p> <p>Sistem Pengendalian Internal Mampu Memoderasi pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p>
4.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	(Rahman Pura 2021)	<p>Variabel independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem pengendalian internal</li> <li>2. Sistem informasi akuntansi</li> <li>3. Pengawasan keuangan</li> </ol> <p>Variabel dependen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas laporan keuangan</li> </ol>	Analisis regresi berganda	<p>Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan</p> <p>Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.</p>

			Objek : Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto		Pengawasan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
5.	Pengaruh Kompetensi Sdm, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kab. Limapuluh Kota)	(Riedy Riandani 2017)	Variabel independen : 1. Kompetensi SDM 2. Pemanfaatan teknologi informasi 3. Pengendalian intern pemerintah Variabel dependen : 1. Kualitan laporan keuangan pemerintah Objek : seluruh SKPD yang ada pada Kabupaten Lima Puluh Kota	Analisis regresi berganda	Kompetensi SDM memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota  Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah di kabupaten Lima Puluh Kota.  Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintahan kabupaten Lima Puluh Kota.

6.	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun 2018)	(Shintami Oktavia, Sri Rahayu 2019)	<p>Variabel independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi SDM</li> <li>2. Komitmen organisasi</li> <li>3. Sistem akuntansi keuangan daerah</li> </ol> <p>Variabel dependen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas laporan keuangan</li> </ol> <p>Objek : Pegawai bagian keuangan pada SKPD Kota Bandung.</p>	<p>Metode kuantitatif,</p> <p>Analisis deskriptif,</p> <p>Analisis regresi linier berganda dan uji asumsi klasik</p>	<p>Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p>Secara parsial Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, dan SAKD berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.</p>
7.	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan,	(Putriasri Pujanira 2017)	<p>Variabel independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi SDM</li> <li>2. Standart akuntansi pemerintahan</li> <li>3. Sistem akuntansi</li> </ol>	<p>Analisis deskriptif</p> <p>Analisis regresi linear sederhana</p>	<p>Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan</p>

	<p>Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY</p>		<p>keuangan daerah</p> <p>Variabel dependen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah</li> </ol> <p>Objek : Dinas-dinas Daerah Pemerintah Daerah DIY.</p>	<p>Analisis regresi linear berganda.</p>	<p>Pemerintah Daerah DIY.</p> <p>Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY.</p> <p>Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY.</p> <p>Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



8.	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan	(Siti Irafah, Eka Nurmala Sari, Muhyarsyah 2020)	<p>Variabel independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi SDM</li> <li>2. Internal audit</li> <li>3. Penerapan sistem informasi keuangan daerah (SIKD)</li> </ol> <p>Variabel dependen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas laporan keuangan</li> </ol> <p>Objek : Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota Sumatera utara.</p>	Path analysis	<p>Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan</p> <p>Peran Internal Audit berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan secara parsial</p> <p>Kesuksesan penerapan SIKD tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan secara parsial</p> <p>Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, Kesuksesan penerapan SIKD berpengaruh secara simultan terhadap kualitas Laporan Keuangan.</p>
9.	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem	(Irzal Tawaqal, Suparno 2017)	<p>Variabel independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem informasi akuntansi</li> </ol>	Analisis regresi linier berganda	Penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

	<p>Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kota Banda Aceh</p>		<p>2. Sistem pengendalian internal 3. Kompetensi SDM</p> <p>Variabel dependen : 1. Kualitas laporan keuangan</p> <p>Objek : Seluruh SKPD yang ada pada lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh</p>		<p>SKPD Kota Banda Aceh.</p> <p>Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Banda Aceh.</p> <p>Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Banda Aceh.</p> <p>Penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Banda Aceh.</p>
10.	<p>Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas</p>	<p>(Siska Yulia Defitri 2018)</p>	<p>Variabel independen : 1. Pengelolaan keuangan daerah 2. Sistem akuntansi keuangan daerah</p>	<p>Penelitian kuantitatif Pendekatan deskriptif Analisis regresi linear berganda</p>	<p>Pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah.</p>

	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		<p>Variabel dependen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas laporan keuangan daerah</li> </ol> <p>Objek : Organisasi perangkat daerah di Kota Solok</p>		Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
11.	Determinan Kualitas Laporan Keuangan Satuan Organisasi Perangkat Daerah	(Mirnawati et al., 2021)	<p>Variabel independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi staf akuntansi</li> <li>2. Standart akuntansi pemerintahan</li> <li>3. Sistem pengendalian intern</li> <li>4. Pemanfaatan teknologi informasi</li> </ol> <p>Variabel dependen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah</li> </ol> <p>Objek : Satuan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bengkalis</p>	<p>Metode deskriptif kuantitatif</p> <p>Metode proportional sampling</p> <p>Uji reliabilitas</p>	Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara signifikan oleh kompetensi staf akuntansi, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), penerapan SPI dan pemanfaatan teknologi informasi.
12.	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap	(Sa'adah & Nasrullah, 2021)	<p>Variabel independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi sumber daya manusia</li> <li>2. Pemanfaatan teknologi informasi</li> <li>3. Sistem pengendalian intern</li> </ol>	<p>Pendekatan kuantitatif</p> <p>Metode kuesioner</p> <p>Metode simple random sampling</p>	Secara parsial kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas

	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan		Variabel dependen : 1. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Metode analisis data uji regresi linear berganda	laporan keuangan pemerintah daerah  Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah  Secara simultan, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota pekalongan
13.	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap	(Ridzal et al., 2022)	Variabel independen : 1. Kapasitas sumber daya manusia 2. Pemanfaatan teknologi informasi 3. Sistem pengendalian intern	Penelitian kuantitatif  Metode purposive sampling  Metode kuesioner  Metode regresi	Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kapasitas laporan keuangan pemerintah daerah  Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kapasitas

	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan		Variabel dependen : 1. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	linear berganda	laporan keuangan pemerintah daerah  pengendalian intern berpengaruh terhadap kapasitas laporan keuangan pemerintah daerah
--	---------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------	-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu sistem akuntansi yang di dalamnya terdapat proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan dan laporan keuangan dalam wujud melaksanakan APBD, yang dilakukan dalam berbagai prinsip akuntansi yang sudah diterima secara umum. Sistem akuntansi keuangan daerah dibentuk untuk memberikan beragam informasi keuangan yang dibutuhkan untuk perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, serta penilaian performa pemerintah (Mokoginta et al., 2021).

Sejalan dengan prinsip teori *stewardship* bahwa pemerintah harus melaksanakan tugas, wewenang dengan tepat dan mempertanggungjawabkan keuangan yang sudah diamanahkan, sehingga tujuan ekonomi pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Hal tersebut berkaitan dengan Nilawati et al., (2021) mengatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah

menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Oleh karena itu, untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas diperlukan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik. Hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mokoginta et al., 2021) sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Maka semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya maka penelitian kali ini mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

#### **2.4.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Sejalan dengan teori *stewardship* yang dalam hal ini adalah penerapan sistem pengendalian intern dengan semua dimensi yang ada di pemerintah daerah akan memberikan panduan dan dukungan dalam bentuk aturan dan administrasi pemerintahan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagai steward dapat terlaksana dengan baik, semua itu untuk kepentingan masyarakat banyak. Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Dalam menjalankan tugas tersebut, seorang steward yang melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab, transparan dan akuntabel. Guna menyelenggarakan tugas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh

steward sebagaimana dimandatkan oleh *principal*, agar berjalan dengan baik, maka diperlukan fungsi pengawasan dalam bentuk pengendalian intern.

Tawaqal & Suparno, (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya. Hal ini sejalan dengan (Riandani, 2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Serta diperkuat oleh (Tawaqal & Suparno, 2017) dengan hasil yang serupa.

Maka dari itu berdasarkan penelitian sebelumnya penelitian kali ini mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

#### **2.4.3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Menurut (Oktavia & Rahayu, 2018), kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Karakteristik kompetensi. Menurut Spencer and Spencer dalam (Oktavia & Rahayu, 2018) terdiri dari motif, watak, konsep diri, pengetahuan dan keterampilan. Salah satu faktor dalam yang membuat LKPD itu berkualitas adalah dari penyusun LKPD itu sendiri adalah sumber daya manusia (SDM). Apabila SDM dari suatu organisasi ataupun instansi tidak berkompeten, maka hasil dari kualitas laporan keuangan daerah yang dikeluarkan akan mengalami penurunan/kurang berkualitas. Namun jika SDM dari suatu

organisasi atau instansi itu berkompeten, maka hasil dari laporan keuangan daerah yang dikeluarkan akan baik/berkualitas (Oktavia & Rahayu, 2018).

Hal ini sejalan dengan (Oktavia & Rahayu, 2018) kompetensi sumber daya manusia secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan (Irafah et al., 2020) juga memperoleh hasil yang sama, hal tersebut semakin memperkuat bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya maka penelitian kali ini mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

#### **2.4.4. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Menurut (Sa'adah & Nasrullah, 2021) Komputer adalah salah satu aset penting tiap-tiap dinas maka terdapat jadwal pemeliharaan secara rutin untuk mengantisipasi hal-hal yang diluar dugaan. Perkembangan berbagai macam teknologi informasi terutama komputer dan internet membuat pergeseran tata cara pelayanan publik menjadi sistem online yang terkomputerisasi. Dalam hal ini penggunaan perangkat lunak akuntansi dapat berdampak pada peningkatan kualitas terutama berkaitan dengan akurasi dan kecepatan. Artinya apabila pembuatan LKPD mengalami keterlambatan maka bisa diakibatkan oleh terkendala aplikasi, human errors maupun input dari masing- masing operator.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Ridzal et al., 2022) dengan hasil Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kapasitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil yang serupa juga dilakukan (Mirnawati et al., 2021). Maka dari itu berdasarkan

penelitian sebelumnya maka penelitian kali ini mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

#### **2.4.5. Pengaruh Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

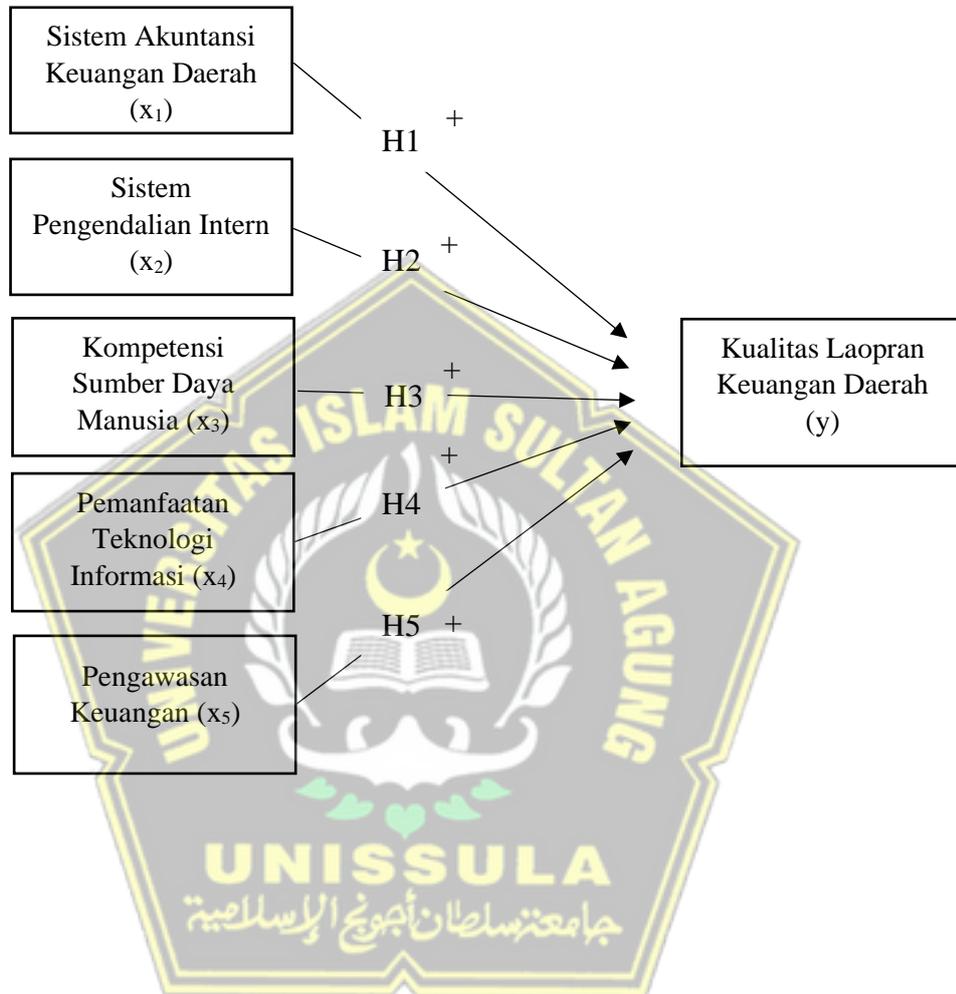
Berdasarkan keputusan Presiden Nomor 74 tahun 2001 Pasal 16 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pengawasan telah dilakukan dengan baik, pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai rencana dan dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik yang akan terlihat pada laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Penelitian mengenai pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan telah dilakukan oleh (Rosmalita & Nadirsyah, 2020) menunjukkan hasil bahwa Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Aceh. Sedangkan penelitian Pujiswara et al., (2014) menunjukkan hasil bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Mansur et al.,(2017) analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan hasil bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

H5 : Pengawasan Keuangan Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

## 2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan model konseptual yang telah didasarkan pada penelitian kali ini, maka pemikiran teoritik dapat dilihat sebagai berikut :



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian asosiatif yaitu penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel berupa angka-angka yang selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan prosedur statistik (Irafah et al., 2020).

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data premier, yaitu data diperoleh dari subjek penelitian secara langsung melalui prosedur dan teknik pengambilan data menggunakan cara wawancara, atau melalui penyebaran kuisioner.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan sekelompok orang, kejadian, atau sesuatu yang memiliki karakteristik dan kualitas yang peneliti tetapkan untuk dipelajari kemudian dapat ditarik kesimpulan. Sebagai suatu populasi, kelompok subjek ini harus memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang sama yang membedakannya dari kelompok subjek yang lain. Ciri yang dimaksud tidak hanya sebatas ciri lokasi, tetapi dapat terdiri dari karakteristik individu. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh SKPD (satuan kerja perangkat daerah) di Jepara yang berjumlah 42, terdiri dari dinas, badan, kantor, kecamatan, dan inspektorat.

Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi, yang diambil dengan berbagai cara sehingga dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Karena sampel termasuk bagian populasi, maka harus memiliki karakteristik yang dimiliki populasinya. Adapun untuk menentukan jumlah sampel yang digunakan oleh peneliti adalah metode sensus, teknik penentuan sampelnya dengan cara menjadikan semua anggota sebagai sampel. Istilah lain metode sensus ialah sampel jenuh.

Berdasarkan metode sensus, peneliti mengambil seluruh pengurus yang akan menjadi populasi sekaligus sampel dari 42 SKPD di Jepara. Adapun terkait jumlah sampel yang akan diambil yaitu sebanyak 2 yang berkaitan langsung dengan laporan keuangan dari setiap SKPD. Total kurang lebih akan ada 84 sampel untuk diteliti.

### **3.3 Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung pada penelitian dilapangan dan pengamatan secara langsung dari sumber atau objek penelitian yang dilakukan dengan metode kuisisioner/angket. Kuisisioner adalah pertanyaan yang diisi oleh responden. Sejumlah pertanyaan diajukan kepada responden kemudian diminta untuk menjawab sesuai pendapat mereka.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah hal yang sangat penting dalam penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penusunan penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode kuisisioner/angket. Metode ini dilakukan dengan cara penyebaran kuisisioner yang telah disusun secara terstruktur, dimana sejumlah pertanyaan tertulis disampaikan pada responden untuk ditanggapi sesuai dengan kondisi yang dialami oleh responden.

Tujuan dilakukan kuesioner atau angket ialah (a) memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, (b) memperoleh informasi mengenai suatu masalah secara serentak. Fungsi digunakannya teknik kuesioner dalam penelitian ini yaitu untuk mengumpulkan informasi melalui jawaban responden atas pernyataan yang telah disusun mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Kuisisioner yang digunakan adalah kuisisioner tertutup, karena responden hanya memilih jawaban yang telah tersedia dan diharapkan memiliki jawaban

yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Responden diminta untuk memilih jawaban dalam bentuk skala pengukuran. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Pencipta skala ini adalah seorang ahli psikologi sosial dari Amerika Serikat bernama Rensis Likert, yang mana nama skala ini adalah skala Likert. Skala Likert adalah skala penelitian yang digunakan untuk mengukur pendapat dan sikap. Variabel penelitian yaitu pernyataan yang digunakan dalam penelitian dan ditetapkan secara spesifik oleh peneliti. Dalam skala ini jawaban responden diberi skor menggunakan 5 (lima) point, yakni nilai 1 berarti Sangat Tidak Setuju(STS), nilai 2 berarti Tidak Setuju(TS), nilai 3 berarti Kurang Setuju(KS), nilai 4 berarti Setuju(S), dan nilai 5 berarti Sangat Setuju(SS).

### **3.5 Definisi Operasional Variabel dan Indikator**

#### **3.5.1. Variabel**

##### **3.5.1.1. Variabel dependen**

Variabel dependen atau biasa disebut variabel terikat, merupakan variabel yang disebabkan/dipengaruhi oleh adanya variabel bebas/independen. Besarnya perubahan variabel ini tergantung dari besarnya variabel independen. Variabel dari penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah Ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. (Tawaqal & Suparno, 2017)

##### **3.5.1.2. Variabel independen**

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau penyebab berubahnya variabel dependen. Variabel independen dari penelitian ini adalah sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, sistem pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia.

1. Sistem akuntansi keuangan daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.(Mokoginta et al., 2021)

2. Sistem pengendalian intern

Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu.(Mokoginta et al., 2021)

3. Kompetensi sumber daya manusia

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. (Kharis, 2010) dalam (Tawaqal & Suparno, 2017)

4. Pemanfaatan teknologi informasi

Pemanfaatan teknologi informasi adalah harapan atas manfaat dari penggunaan teknologi informasi dalam pemenuhan tugas, pengukurannya didasarkan pada waktu penggunaan dan variasi aplikasi yang dioperasikan. Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) adalah pemanfaatan secara optimal teknologi informasi seperti jaringan komputer yang digunakan manusia untuk memnudahkan dan mengefisiensikan tugas serta kinerja meningkat. Indikator penggunaan teknologi informasi (TI) menurut (Alminanda & Marfuah, 2018) dalam (Ridzal et al., 2022) meliputi (1) penggunaan komputer dan (2) jaringan.

### 5) Pengawasan keuangan

Pengawasan keuangan daerah merupakan bagian integral dari pengolahan keuangan daerah. Berdasarkan pengertiannya, pengawasan keuangan daerah pada dasarnya mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan undang-undang yang berlaku (Rosmalita & Nadirsyah, 2020). Variabel pengawasan keuangan daerah dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu penentuan standar pengawasan, pengukuran hasil pekerjaan, perbandingan hasil dengan standar dan koreksi Penyimpangan

### 3.5.2. Indikator

Tabel 3.1 Indikator Penelitian

No.	Variabel	Indikator	Skala	Sumber
1.	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ( $X_1$ )	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Pencatatan</li><li>○ Pengikhtisaran</li><li>○ Pelaporan</li></ul>	Likert	(Tawaqal & Suparno, 2017)
2.	Sistem Pengendalian Intern ( $X_2$ )	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Lingkungan pengendalian</li><li>○ Pemantauan</li><li>○ Penilaian risiko</li><li>○ Aktivitas Pengendalian</li><li>○ Informasi dan komunikasi</li></ul>	Likert	(Tawaqal & Suparno, 2017)
3.	Kompetensi Sumber Daya Manusia ( $X_3$ )	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Pengetahuan</li><li>○ Keterampilan</li><li>○ Sikap</li></ul>	Likert	(Tawaqal & Suparno, 2017)

4.	Pemanfaatan Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Perangkat lunak</li> <li>○ Jaringan Internet</li> <li>○ Pemeliharaan</li> </ul>	Likert	(Sa'adah & Nasrullah, 2021)
5.	Pengawasan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pelaksanaan Pengawasan</li> <li>○ Pengelolaan Keuangan</li> </ul>	Likert	(PURA, 2021)
6.	Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Relevan</li> <li>○ Andal</li> <li>○ Dapat dinilai atau dapat dibandingkan</li> <li>○ Dapat Dipahami</li> </ul>	Likert	(Tawaqal & Suparno, 2017)

### 3.6 Metode Analisis Data

#### 3.6.1. Uji Validitas

Uji validitas ini menggambarkan bahwa pertanyaan yang digunakan mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur (valid). Suatu pertanyaan yang digunakan dikatakan valid jika skor pertanyaan tersebut berkorelasi secara signifikan dengan skor totalnya, batas minimum  $r = 0.22$  apabila korelasi antara skor butir pertanyaan dengan skor total kurang dari 0,22 maka dinyatakan tidak valid dan harus dibuang atau dikeluarkan (Mokoginta et al., 2021).

#### 3.6.2. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas adalah data untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Tinggi rendahnya reliabilitas secara empiris ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas (Mokoginta et al., 2021).

### **3.6.3. Uji Asumsi Klasik**

Pengujian model asumsi klasik terhadap model regresi bertujuan untuk dapat mengetahui apakah model regresi tersebut merupakan model regresi yang baik atau tidak. Analisis regresi yang dilakukan dengan metode analisis linier berganda harus mencakup ketentuan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas.

#### **3.6.3.1. Uji Normalitas**

Uji normalitas data merupakan uji distribusi data yang akan dianalisis. Uji ini bertujuan untuk mengukur apakah dalam regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya memiliki distribusi normal atau mendekati normal.

Penulis menggunakan pengujian normalitas kolmogrov-sminorv test, yaitu jika p-veluenya menunjukkan  $> 0,05$  berarti hipotesis diterima atau terdistribusi normal.

#### **3.6.3.2. Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik scatter plot yaitu titik yang menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Ada tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi juga dapat diketahui melalui uji Gletser yaitu dengan meregres nilai absolute residual terhadap variabel terkait. Model regresi dapaty dikatakan terbebas dari heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan koefisien signifikansi yang telah ditentukan. Apabila tingkat signifikansi  $> 0,05$  maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.

### **3.6.3.3. Uji Multikolinieritas**

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas atau tidak dapat dilakukan dengan melihat nilai dari VIF (Varian Influence Factor) dan Tolerance. Apabila nilai  $VIF < 10$  dan  $Tolerance > 0,10$  maka model regresi yang digunakan terbebas dari masalah multikolinieritas.

### **3.6.4. Analisis Uji Hipotesis**

Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel independen terhadap dependen. Untuk mengetahui diterima atau tidak hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, dilakukan analisis data dengan menggunakan uji t. Uji t digunakan untuk membandingkan antara nilai  $t_h$  dengan nilai  $t$  dengan kaidah keputusan yaitu jika nilai  $t_h \geq t$ , maka  $H_0$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, begitupun sebaliknya.

### **3.6.5. Koefisien Determinasi**

Untuk mengukur besarnya proporsi atau presentasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen maka dilakukan pengujian koefisien determinan. Koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Responden

##### 4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di seluruh SKPD kabupaten Jepara yang kurang lebih berjumlah 42 SKPD. Data penelitian dilakukan dengan cara membagikan kuisisioner secara online dengan google form. Hasil yang diisi oleh responden atau data yang dapat diolah yaitu sekitar 80 dari 84 kuisisioner yang disebar atau sebanyak 95%.

Tabel 4.1 Penyebaran Kuisisioner

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Kuisisioner yang disebar pada responden	84
2.	Kuisisioner yang kembali pada peneliti	82
3.	Kuisisioner yang tidak kembali	2
4.	Kuisisioner yang tidak dapat diolah karena tidak lengkap	2
5.	Kuisisioner yang dapat diolah	80
<b>Response rate : <math>80/84*100\% = 95\%</math></b>		

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan 80 sampel ini dikelompokkan menurut jenis kelamin, pekerjaan, usia, dan tingkat pendidikan. Data yang tersedia kemudian ditabulasi dan disajikan menggunakan statistik deskriptif sebagai berikut :

##### 1) Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Identitas responden berdasarkan jenis kelamin pada penelitian ini disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	31	38,75%
2.	Perempuan	49	61,25%
Total		80	100%

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan 80 sampel tersebut dijelaskan bahwa dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak dibanding responden dengan jenis kelamin laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari jumlah persentase perempuan sebanyak 61,25% sedangkan laki-laki sebanyak 38,75%.

## 2) Identitas Responden Berdasarkan Usia

Identitas responden berdasarkan usia pada penelitian ini disajikan pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah	Persentase
1	23-27 tahun	14	17,5%
2.	28-32 tahun	26	32,5%
3.	>35 tahun	40	50%
Total		80	100%

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 80 responden bahwa responden dengan usia >35 tahun paling banyak dalam penelitian ini yaitu sebanyak 50% dari 80 responden. Dapat dilihat pada tabel diatas responden dengan usia 23-27 tahun berjumlah 14 responden, begitupun 28-32 tahun yang berjumlah sama yaitu 26 responden, dan diatas 35 tahun sebanyak 40 responden.

### 3) Identitas Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Identitas responden berdasarkan jenjang pendidikan pada penelitian ini disajikan pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SLTA	4	5%
2.	D3	17	22%
3.	S1	45	56%
4.	S2	9	11%
5.	S3	5	6%
Total		80	100%

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan 80 sampel tersebut dijelaskan bahwa responden dengan jenjang pendidikan S1 paling banyak dalam penelitian ini sebanyak 45 responden atau sebesar 56%, dan yang paling sedikit adalah dari jenjang pendidikan SLTA yaitu sebanyak 4 responden atau sebesar 5% saja. Hal ini dapat dilihat pada tabel di atas dengan jumlah responden dengan jenjang pendidikan SLTA sebanyak 4 responden, D3 sebanyak 17 responden, S1 sebanyak 45 responden, S2 sebanyak 9 responden, dan S3 sebanyak 5 responden.

### 4) Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Identitas responden berdasarkan latar belakang pendidikan pada penelitian ini disajikan pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No.	Latar belakang pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Akuntansi	60	75%
2.	Manajemen	17	21,25%
3.	Hukum	-	-

4.	Psikologi	2	2,5%
5.	Syariah	-	-
6.	Lainnya	1	1,25%
Total		80	100%

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 80 responden, responden dengan latar pendidikan Akuntansi paling banyak dalam penelitian ini yaitu sebanyak 75% atau sebanyak 60 responden. Diurutan kedua ada jurusan manajemen sebanyak 21,25% atau 17 responden.

#### 4.2 Statistik Deskriptif

Berdasarkan data sampel yang bersumber pada 80 responden diperoleh deskripsi mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Gambaran atau deskripsi dari suatu data ini dapat dilihat dari jumlah sampel, range nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Adapun hasil deskriptif statistik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Statistik Deskripsif

Variabel	Descriptive Statistics					
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kualitas Laporan Keuangan Daerah	80	12	48	60	53,86	3,778
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	80	10	40	50	43,56	2,565
Sistem Pengendalian Intern	80	14	41	55	48,16	3,297
Kompetensi sumber Daya Manusia	80	13	32	45	40,20	3,251
Pemanfaatan Teknologi Informasi	80	8	27	35	30,21	2,226
Pengawasan Keuangan	80	9	21	30	25,97	1,968

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS

Tabel diatas memberikan gambaran bahwa N atau jumlah data pada setiap variabel adalah 80 data dengan titik kritis 0,22 yang berasal dari responden penanggungjawab laporan keuangan di setiap SKPD. Pada variabel kualitas laporan keuangan daerah diketahui nilai minimum 48, nilai maksimum 60, nilai mean 53,86, dan standar deviaton sebesar 3,778. untuk variabel sistem akuntansi keuangan daerah diketahui nilai minimum 40, nilai maksimum 50, nilai mean 43,56 , dan standar deviaton sebesar 2,565. Variabel sistem pengendalian intern diketahui nilai minimum 41, nilai maksimum 55, nilai mean 48,16, dan standar deviaton sebesar 3,297. Variabel kompetensi sumber daya manusia diketahui nilai minimum 32, nilai maksimum 45, nilai mean 40,20, dan standar deviaton sebesar 3,251. Dan pada Variabel pemanfaatan teknologi informasi diketahui nilai minimum 27, nilai maksimum 35, nilai mean 30,21, dan standar deviaton sebesar 2,226. Dan variabel pengawasan keuangan diketahui nilai minimum 21, nilai maksimum 30, nilai mean 25,97 , dan standar deviaton sebesar 1,968.

#### 4.2.1. Analisis Deskriptif Variabel

Analisis deskriptif berguna untuk menjabarkan persepsi responden terkait setiap variabel dalam penelitian yang diteliti yaitu : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknolog Informasi, Pengawasan Keuangan dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Untuk mengetahui bobot jawaban dari responden, maka pengukuran setiap variabel dengan penggunaan skala *Likert* dimulai kategori Sangat Setuju(5), Setuju(4), Kurang Setuju(3), Tidak Setuju(2), Sangat Tidak Setuju(1). Dengan rumus berikut :

$$\text{Nilai indeks} = \frac{((\%F1 \times 1) + (\%F2 \times 2) + (\%F3 \times 3) + (\%F4 \times 4) + (\%F5 \times 5))}{5}$$

Keterangan :

F1 : Frekuensi responden yang menjawab 1

F2 : Frekuensi responden yang menjawab 2

F3 : Frekuensi responden yang menjawab 3

F4 : Frekuensi responden yang menjawab 4

F5 : Frekuensi responden yang menjawab 5

Rentang standart tiga kotak (three box method) dipilih untuk menentukan rentang jawaban yang digunakan untuk mengisi indikator pertanyaan untuk setiap variabel yang diteliti (Mira Fajrin Sholichatun- et al., 2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan rentang jawaban dikonversi ke satuan 100 untuk kemudahan dan penjelasan setiap jawaban.

Perhitungan nilai indeks jawaban akan menghasilkan nilai sebagai berikut :

- a. Nilai indeks minimal diperoleh 100% jika responden menjawab 1 :1 x 100%, dengan demikian nilai indeks minimal diperoleh sebesar 100% dibagi 5 = 20%
- b. Nilai indeks maksimal diperoleh jika 100% responden menjawab 5 : 5 x 100% = 500% dibagi 5 = 100%

Dengan demikian diperoleh 20% nilai indeks minimal dan nilai maksimal sebesar 100%. Berikut rumus untuk menentukan rentang skala responden :

$$RS = \frac{m - n}{k}$$
$$RS = \frac{100 - 20}{3} = 26,66$$

Keterangan :

RS = rentang skala                      n = angka terendah

m = angka tertinggi                      k = total kategori

berdasarkan dari hasil rumus diatas, dengan rentang skala indeks yang terbagi menjadi 3 kelompok didapatkan nilai rentang 26,66. Selanjutnya pedoman tafsiran angka indikator tersebut dapat diuraikan seperti berikut :

- 1) Nilai indeks 20,00 – 46,66 = menunjukkan arti tinggi
- 2) Nilai indeks 46,67 – 73,33 = menunjukkan arti moderat/sedang
- 3) Nilai indeks 73,34 – 100,00= menunjukkan arti rendah

#### A. Tanggapan Responden Variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berikut hasil tanggapan dari jawaban responden mengenai variabel kualitas laporan keuangan daerah :

Tabel 4. 7 Tanggapan Responden Variabel Kualitas Laporan Keuanagn Daerah

No.	Indikator	SS	S	KS	TS	STS	Indeks (%)	Kategori
1.	Y1.1	13	8	0	0	0	21	Tinggi
2.	Y1.2	11	11	0	0	0	22	Tinggi
3.	Y1.3	8	15	0	0	0	23	Tinggi
4.	Y1.4	11	11	0,6	0	0	22,6	Tinggi
5.	Y1.5	11	11	0	0	0	22	Tinggi
6.	Y1.6	11	12	0	0	0	23	Tinggi
7.	Y1.7	6	17	0,6	0	0	23,6	Tinggi
8.	Y1.8	10	13	0	0	0	23	Tinggi
9.	Y1.9	5	19	0,6	0	0	24,6	Tinggi

10.	Y1.10	10	12	0	0	0	22	Tinggi
11.	Y1.11	9	14	0	0	0	23	Tinggi
12.	Y1.12	14	8	0	0	0	22	Tinggi
<b>Rata-rata</b>							<b>22,65</b>	<b>Tinggi</b>

Sumber : data primer yang diolah di SPSS

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa hasil rata-rata indeks jawaban responden mengenai variabel kualitas laporan keuangan daerah menunjukkan nilai sebesar 22,65 yang termasuk dalam kategori tinggi (20,00 – 46,66). Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan responden meyakini kualitas laporan keuangan daerah di Jepara sudah relevan, andal, dapat dinilai, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami dengan baik.

#### **B. Tanggapan Responden Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Berikut hasil tanggapan dari jawaban responden mengenai variabel sistem akuntansi keuangan daerah :

Tabel 4. 8 Tanggapan Responden Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

No.	Indikator	SS	S	KS	TS	STS	Indeks (%)	Kategori
1.	X1.1	14	8	0	0	0	22	Tinggi
2.	X1.2	5	18,5	0,5	0	0	24	Tinggi
3.	X1.3	8	14,5	0,5	0	0	23	Tinggi
4.	X1.4	8	15	0	0	0	23	Tinggi
5.	X1.5	5	19	0	0	0	24	Tinggi

6.	X1.6	1,5	22	0,5	0	0	24	Tinggi
7.	X1.7	12	10	0	0	0	22	Tinggi
8.	X1.8	2,5	21	1,5	0	0	25	Tinggi
9.	X1.9	6	18	0	0	0	24	Tinggi
10.	X1.10	12	10	0	0	0	22	Tinggi
<b>Rata-rata</b>							23,3	Tinggi

Sumber : data primer yang diolah di SPSS

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa hasil rata-rata indeks jawaban responden mengenai variabel sistem akuntansi keuangan daerah menunjukkan nilai sebesar 23,3 yang termasuk dalam kategori tinggi (20,00 – 46,66). Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan dari jawaban responden sudah melakukan pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan dengan baik dan benar.

### C. Tanggapan Responden Variabel Sistem Pengendalian Intern

Berikut hasil tanggapan dari jawaban responden mengenai variabel sistem pengendalian intern :

Tabel 4. 9 Tanggapan Responden Variabel Sistem Pengendalian Intern

No.	Indikator	SS	S	KS	TS	STS	Indeks (%)	Kategori
1.	X2.1	14	8	0	0	0	22	Tinggi
2.	X2.2	10	12	0	0	0	22	Tinggi
3.	X2.3	3	12	12	1	0	28	Tinggi
4.	X2.4	8	15	0	0	0	23	Tinggi

5.	X2.5	7	15,5	0,5	0	0	23	Tinggi
6.	X2.6	9,5	13	0,5	0	0	23	Tinggi
7.	X2.7	8,3	14	0,7	0	0	23	Tinggi
8.	X2.8	8,3	15	0,7	0	0	24	Tinggi
9.	X2.9	9	14	0	0	0	23	Tinggi
10.	X2.10	9	14	0	0	0	23	Tinggi
11.	X2.11	10	13	0	0	0	23	Tinggi
<b>Rata-rata</b>							23,36	Tinggi

Sumber : data primer yang diolah di SPSS

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa hasil rata-rata indeks jawaban responden mengenai variabel sistem pengendalian intern menunjukkan nilai sebesar 23,36 yang termasuk dalam kategori tinggi (20,00 – 46,66). Hal ini menunjukkan bahwa jawaban dari responden kebanyakan meyakini pada setiap SKPD sudah menerapkan sistem pengendalian intern yang baik dan benar.

#### **D. Tanggapan Responden Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Berikut hasil tanggapan dari jawaban responden mengenai variabel kompetensi sumber daya manusia :

Tabel 4. 10 Tanggapan Responden Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

No.	Indikator	SS	S	KS	TS	STS	Indeks (%)	Kategori
1.	X3.1	13	8,3	0,7	0	0	22	Tinggi
2.	X3.2	5	18	1	0	0	24	Tinggi

3.	X3.3	9	13	1	0	0	23	Tinggi
4.	X3.4	10	12	1	0	0	23	Tinggi
5.	X3.5	11	10	1	0	0	22	Tinggi
6.	X3.6	10	12	0	0	0	22	Tinggi
7.	X3.7	14	8	0	0	0	22	Tinggi
8.	X3.8	4	20	0	0	0	24	Tinggi
9.	X3.9	11	11	0	0	0	22	Tinggi
<b>Rata-rata</b>							22,67	Tinggi

Sumber : data primer yang diolah di SPSS

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa hasil rata-rata indeks jawaban responden mengenai variabel kompetensi sumber daya manusia menunjukkan nilai sebesar 23,3 yang termasuk dalam kategori tinggi (20,00 – 46,66). Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan dari jawaban responden menyetujui bahwa pengetahuan, keterampilan, dan sikap terhadap laporan keuangan itu perlu.

#### **E. Tanggapan Responden Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Berikut hasil tanggapan dari jawaban responden mengenai variabel pemanfaatan teknologi informasi :

Tabel 4.11 Tanggapan Responden Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

No.	Indikator	SS	S	KS	TS	STS	Indeks (%)	Kategori
1.	X4.1	10,5	12	0,5	0	0	23	Tinggi
2.	X4.2	4	19,5	0,5	0	0	24	Tinggi

3.	X4.3	10	12	0	0	0	22	Tinggi
4.	X4.4	7	16	0	0	0	23	Tinggi
5.	X4.5	8	14,5	0,5	0	0	23	Tinggi
6.	X4.6	3	20,3	0,7	0	0	24	Tinggi
7.	X4.7	3,3	19	0,7	0	0	23	Tinggi
<b>Rata-rata</b>							23,14	Tinggi

Sumber : data primer yang diolah di SPSS

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa hasil rata-rata indeks jawaban responden mengenai variabel pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan nilai sebesar 23,14 yang termasuk dalam kategori tinggi (20,00 – 46,66). Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan jawaban responden memerlukan perangkat lunak, jaringan internet, dan pemeliharaan yang memadahi setiap SKPD.

#### **F. Tanggapan Responden Variabel Pengawasan Keuangan**

Berikut hasil tanggapan dari jawaban responden mengenai variabel pengawasan keuangan :

Tabel 4. 12 Tanggapan Responden Variabel Pengawasan Keuangan

No.	Indikator	SS	S	KS	TS	STS	Indeks (%)	Kategori
1.	X5.1	7,5	15	0,5	0	0	23	Tinggi
2.	X5.2	2	21	2	0	0	25	Tinggi
3.	X5.3	2	22	1	1	0	25	Tinggi
4.	X5.4	9,3	13	0,7	0	0	23	Tinggi

5.	X5.5	10.5	11.5	0	0	0	22	Tinggi
6.	X5.6	11	11	0	0	0	22	Tinggi
<b>Rata-rata</b>							23,33	Tinggi

Sumber : data primer yang diolah di SPSS

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa hasil rata-rata indeks jawaban responden mengenai variabel pengawasan keuangan menunjukkan nilai sebesar 23,33 yang termasuk dalam kategori tinggi (20,00 – 46,66). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan keuangan di setiap SKPD di Jepara sudah dilakukan dengan baik.

### 4.3 Analisis data

#### 4.3.1. Uji Validitas

Validitas merupakan hubungan sejauh mana instrumen pengukur dapat mengukur variabel penelitian. Suatu instrumendikatakan valid jika telah mengukur suatu variabel penelitian. Dasar pengambilan keputusan uji validitas sebagai berikut:

- a) Apabila nilai  $r$  hitung  $>$  nilai  $r$  tabel maka kuesioner dinyatakan validitas.
- b) Apabila nilai  $r$  hitung  $<$  nilai  $r$  tabel maka kuesioner dinyatakan tidak validitas.

Untuk menentukan nilai  $r$  tabel rumusnya seperti dibawah ini:

$$R \text{ tabel (df) } = n-2$$

$$R \text{ tabel } = 80 = 0.2172$$

Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas

Variabel	Kuisiонер	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Kualitas Laporan	Butir 1	0,636	0,22	Valid
	Butir 2	0,696		Valid

Keuangan Daerah (Y)	Butir 3	0,660		Valid		
	Butir 4	0,602		Valid		
	Butir 5	0,646		Valid		
	Butir 6	0,639		Valid		
	Butir 7	0,626		Valid		
	Butir 8	0,582		Valid		
	Butir 9	0,595		Valid		
	Butir 10	0,697		Valid		
	Butir 11	0,644		Valid		
	Butir 12	0,674		Valid		
	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	Butir 1		0,540	0,22	Valid
		Butir 2		0,743		Valid
Butir 3		0,646	Valid			
Butir 4		0,612	Valid			
Butir 5		0,680	Valid			
Butir 6		0,499	Valid			
Butir 7		0,471	Valid			
Butir 8		0,425	Valid			
Butir 9		0,493	Valid			
Butir 10		0,538	Valid			
Sistem Pengendalian Intern (X2)	Butir 1	0,593	0,22	Valid		
	Butir 2	0,590		Valid		
	Butir 3	0,370		Valid		
	Butir 4	0,592		Valid		
	Butir 5	0,364		Valid		
	Butir 6	0,593		Valid		
	Butir 7	0,711		Valid		
	Butir 8	0,691		Valid		
	Butir 9	0,598		Valid		
	Butir 10	0,667		Valid		

	Butir 11	0,545		Valid
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)	Butir 1	0,743	0,22	Valid
	Butir 2	0,621		Valid
	Butir 3	0,742		Valid
	Butir 4	0,871		Valid
	Butir 5	0,867		Valid
	Butir 6	0,842		Valid
	Butir 7	0,718		Valid
	Butir 8	0,366		Valid
	Butir 9	0,491		Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4)	Butir 1	0,762	0,22	Valid
	Butir 2	0,655		Valid
	Butir 3	0,727		Valid
	Butir 4	0,715		Valid
	Butir 5	0,678		Valid
	Butir 6	0,593		Valid
	Butir 7	0,546		Valid
Pengawasan keuangan (X5)	Butir 1	0,830	0,22	Valid
	Butir 2	0,564		Valid
	Butir 3	0,598		Valid
	Butir 4	0,749		Valid
	Butir 5	0,705		Valid
	Butir 6	0,605		Valid

Sumber : data primer yang diolah di SPSS

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari hasil yang terdapat pada tabel tersebut, maka dapat dikatakan bahwa koefisien korealsi dari seluruh butir kuisioner dengan skor untuk masing-masing total pernyataan adalah signifikan secara statistik, karena semua nilai r hitung > r tabel yang dicari pada taraf derajat 5% dengan n adalah 80 responden, sehingga dapat dinyatakan nilai r tabel sebesar 0,22 , maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator variabel sistem akuntansi keuangan

daerah (X1), sistem pengendalian intern (X2), kompetensi sumber daya manusia (X3), pemanfaatan teknologi informasi (X4), pengawasan keuangan (X5) dan kualitas laporan keuangan daerah (Y) adalah valid.

#### 4.3.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas yaitu tingkat kemampuan suatu instrumen penelitian (kuesioner) dalam mengumpulkan data secara konsisten dari individu. Keputusan yang diambil dalam uji reliabilitas didasarkan pada:

- a. Apabila  $\alpha > \text{minimum alpha cronbach's } (0,6)$  maka kuesioner dinyatakan konsisten
- b. Apabila  $\alpha < \text{minimum alpha cronbach's } (0,6)$  maka kuesioner dinyatakan tidak konsisten.

Hasil pengujian uji reliabilitas sebagai berikut :

Tabel 4.14 Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Reliability Coefficient	Alpha	Cronbach Alpha	Keterangan
1.	Kualittas laporan keuangan daerah (Y)	12 item	0,870	0,6	Reliabel
2.	Sistem akuntansi keuangan daerah (X1)	10 item	0,761	0,6	Reliabel
3.	Sistem pengendalian intern (X2)	11 item	0,783	0,6	Reliabel
4.	Kompetensi Sumber daya manusia (X3)	9 item	0,873	0,6	Reliabel

5.	Pemanfaatan teknologi informasi (X4)	7 item	0,795	0,6	Reliabel
6.	Pengawasan keuangan (X5)	6 item	0,766	0,6	Reliabel

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa instrumen yang digunakan sebagai alat ukur penelitian adalah valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai  $\alpha$  dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,6, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indicator variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X1), sistem pengendalian intern (X2), kompetensi sumber daya manusia (X3), pemanfaatan teknologi informasi (X4), pengawasan keuangan (X5) dan kualitas laporan keuangan daerah (Y) reliabel atau handal sebagai alat untuk pengumpul data penelitian.

### 4.3.3. Uji Asumsi Klasik

#### 4.3.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan grafik normal probability p-plot dan Kolmogorov smirnov. Bila sig > 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal.

Berdasarkan table uji normalitas dapat diketahui bahwa nilai Signifikan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai 0,135 yang berarti lebih besar dari 0.05, maka data sudah terdistribusi dengan normal.

Tabel 4.15 Hasil Uji Normalitas

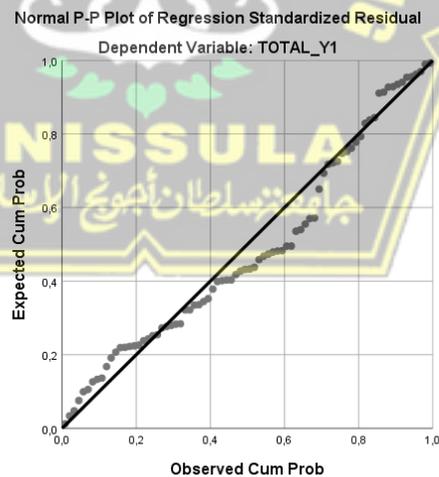
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	,0000000

	Std. Deviation	2,63835312
Most Extreme Differences	Absolute	,130
	Positive	,130
	Negative	-,068
Kolmogorov-Smirnov Z		1,162
Asymp. Sig. (2-tailed)		,135
a. Test distribution is Normal.		

Sumber : data primer yang diolah di SPSS

Uji normalitas juga dapat dilihat dari gambar Normal P-P Plot pada Gambar 4.1. Kriteria sebuah data berdistribusi normal atau tidak dengan pendekatan Normal P-P Plot dapat dilakukan dengan melihat sebaran titik-titik yang ada pada gambar. Apabila sebaran titik-titik tersebut mendekati atau rapat pada garis lurus (diagonal) maka dikatakan bahwa data (data) residual terdistribusi normal, namun apabila sebaran titik-titik tersebut menjauhi garis maka data tidak terdistribusi normal.

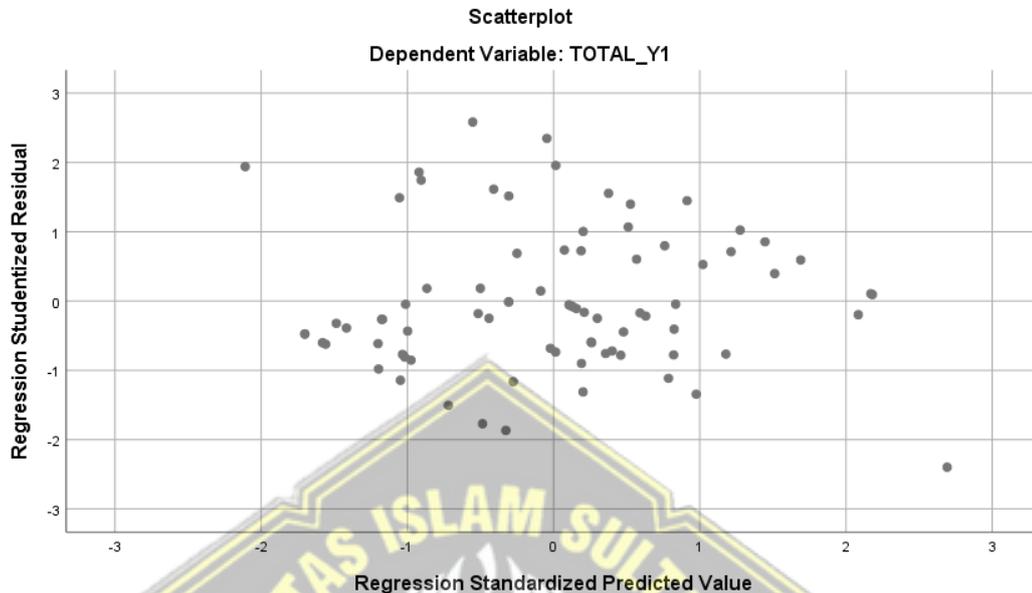
Tabel 4.16 Uji Normal P-Plot



#### 4.3.3.2. Uji Heterokedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik scatter plot yaitu titik yang menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y.

Tabel 4. 17 Uji Heterokedastisitas



Dari hasil uji heteroskedastisitas dapat diketahui bahwa model regresi bebas dari masalah heterokedastisitas, hal ini terlihat pada grafik *scatter plot* yaitu titik yang menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y.

#### 4.3.3.3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel bebas dalam model regresi atau singkatnya kondisi apabila terjadi korelasi yang kuat diantara variabel independen yang berpartisipasi agar terbentuknya model regresi linier. Untuk mengetahui ada tidaknya masalah ini yakni terlihat pada angka di kolom tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Apabila tolerance lebih besar dari 0,1 dan VIF kurang dari 10, maka tidak terdapat masalah multikolinieritas.

Tabel 4. 18 Uji Multikolinieritas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,746	6,164		,283	,778		
	TOTAL_X1	,442	,146	,300	3,036	,003	,674	1,483
	TOTAL_X2	-,038	,136	-,033	-,279	,781	,471	2,122
	TOTAL_X3	,499	,110	,429	4,555	,000	,741	1,349
	TOTAL_X4	,281	,212	,166	1,324	,190	,421	2,377
	TOTAL_X5	,235	,231	,123	1,017	,312	,453	2,205

a. Dependent Variable: TOTAL\_Y1

Dari Tabel 4.12 terdapat tolerance sebanyak 0,674 serta VIF sebanyak 1,483 dari sistem akuntansi keuangan daerah, untuk variabel sistem pengendalian intern terdapat tolerance sebanyak 0,471 serta VIF sebanyak 2,122 , untuk kompetensi sumber daya manusia terdapat tolerance sebanyak 0,741 serta VIF sebesar 1,349 , untuk pemanfaatan teknologi informasi terdapat tolerance 0,421 serta VIF 2,377 dan untuk pengawasan keuangan terdapat tolerance sebanyak 0,453 serta VIF sebesar 2,205. Sehingga dapat disimpulkan dari keseluruhan variabel didapat nilai tolerance lebih dari 0,1 serta nilai VIF < 10. Maka dapat ditarik kesimpulan bebas dari masalah multikolinieritas.

#### 4.3.4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan pengujian yang dipakai untuk menguji hubungan linier minimal dua variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Untuk mengetahui hubungan antara variable independen (sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan), terhadap variabel dependen (kualitas laporan keuangan daerah).

Tabel 4.19 Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Beta Unstandardized	T Hitung	Signifikansi Alpha
Konstanta	1,746	0,283	0,778
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	0,442	3,036	0,003
Sistem Pengendalian Intern (X2)	-0,038	-0,279	0,781
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)	0,499	4,555	0,000
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4)	0,281	1,324	0,190
Pengawasan Keuangan (X5)	0,235	1,017	0,312

Sumber : data primer yang diolah di SPSS

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diatas, maka diperoleh persamaan regresi yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

$$Y = 1,746 + 0,442 X1 + (0,038) X2 + 0,499 X3 + 0,281 X4 + 0,235 X5$$

Hasil persamaan regresi linier berganda tersebut memberikan penjelasan bahwa :

1. Konstanta ( $\alpha$ ) = 1,764 menunjukkan harga konstan, bahwa jika tidak ada variabel Sistem akuntansi keuangan daerah, Sistem Pengendalian Intern, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah, maka kualitas laporan keuangan pemerintah konstan.

2. Koefisien regresi X1 sebesar 0,442 dapat diartikan setiap peningkatan sistem akuntansi keuangan daerah, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah sebesar 0,442 persen.
3. Koefisien regresi X2 sebesar (0,038) dapat diartikan setiap peningkatan sistem pengendalian intern, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah sebesar (0,038) persen.
4. Koefisien regresi X3 sebesar 0,499 dapat diartikan setiap peningkatan sistem akuntansi keuangan daerah, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah sebesar 0,499 persen.
5. Koefisien regresi X4 sebesar 0,281 dapat diartikan setiap peningkatan sistem akuntansi keuangan daerah, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah sebesar 0,281 persen.
6. Koefisien regresi X5 sebesar 0,235 dapat diartikan setiap peningkatan sistem akuntansi keuangan daerah, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah sebesar 0,235 persen.

#### **4.3.5. Uji Hipotesis**

##### **4.3.4.1. Uji Parsial (Uji t)**

Uji t digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari setiap variabel bebas secara parsial (individu) terhadap variabel terikat. Uji t dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikansi dimana  $\alpha = 0,05$ . Berikut adalah hasil uji t.

Tabel 4.20 Hasil Uji Parsial (Uji t)

		Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,746	6,164		,283	,778		
	TOTAL_X1	,442	,146	,300	3,036	,003	,674	1,483
	TOTAL_X2	-,038	,136	-,033	-,279	,781	,471	2,122
	TOTAL_X3	,499	,110	,429	4,555	,000	,741	1,349
	TOTAL_X4	,281	,212	,166	1,324	,190	,421	2,377
	TOTAL_X5	,235	,231	,123	1,017	,312	,453	2,205

a. Dependent Variable: TOTAL\_Y1

Sumber : data primer yang diolah di SPSS

Dari tabel diatas maka dapat diambil hasil uji parsial sebagai berikut :

1. Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Pengujian hipotesis yang pertama adalah menguji apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,442 dan nilai signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Oleh karena itu hipotesis pertama “Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah” **diterima**.

2. Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Pengujian hipotesis yang kedua adalah menguji apakah sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,036 dan nilai signifikansi sebesar 0,781 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem

pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Oleh karena itu hipotesis kedua “Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah” **ditolak**.

3. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Pengujian hipotesis yang ketiga adalah menguji apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,499 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Oleh karena itu hipotesis ketiga “Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah” **diterima**.

4. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Pengujian hipotesis yang keempat adalah menguji apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,281 dan nilai signifikansi sebesar 0,190 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Oleh karena itu hipotesis keempat “Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah” **ditolak**.

5. Pengaruh pengawasan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Pengujian hipotesis yang keempat adalah menguji apakah pengawasan keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien

sebesar 0,235 dan nilai signifikansi sebesar 0,312 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Oleh karena itu hipotesis keempat “Pengawasan Keuangan Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah” **ditolak**.

#### 4.3.4.2. Uji Simultan (Uji f)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F merupakan pengujian signifikan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (X1,X2,X3,X4,X5), yaitu sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan terhadap variabel terikat (Y) yaitu kualitas laporan keuangan daerah. Kesimpulan yang diambil Pengujian ini dengan menggunakan taraf signifikansi 5 % (0,05) Jika nilai signifikan < 0,05, maka Ho diterima, berarti masing-masing variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel terikat.

Tabel 4.21 Uji Simultan (Uji f)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	577,576	5	115,515	15,545	,000 <sup>b</sup>
	Residual	549,912	74	7,431		
	Total	1127,488	79			

a. Dependent Variable: TOTAL\_Y1

b. Predictors: (Constant), TOTAL\_X5, TOTAL\_X3, TOTAL\_X1, TOTAL\_X2, TOTAL\_X4

Sumber : data primer yang diolah di SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa uji F nilainya sebesar 15,545, dengan nilai signifikansi 0,000. Jika dibandingkan dengan nilai alpha, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai alpha ( $0,000 < 0,05$ ). Berdasarkan nilai signifikansi yang kurang dari nilai alpha ini dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan secara keseluruhan bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan daerah.

#### 4.3.6. Uji Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai akan berkisar 0 sampai 1. Apabila nilai = 1 menunjukkan bahwa 100% total variasi diterangkan oleh varian persamaan regresi, atau variabel Y sebesar 100%. Sebaliknya apabila nilai = 0 menunjukkan bahwa tidak ada total varian yang diterangkan oleh varian bebas dari persamaan regresi baik X1, X2, X3, X4 dan X5.

Tabel 4.22 Uji Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,716 <sup>a</sup>	,512	,479	2,726	1,585

a. Predictors: (Constant), TOTAL\_X5, TOTAL\_X3, TOTAL\_X1, TOTAL\_X2, TOTAL\_X4

b. Dependent Variable: TOTAL\_Y1

Sumber : data primer yang diolah di SPSS

Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel diatas bahwa Adjusted R adalah 0,479. Hal ini berarti bahwa 47,9% variabel kualitas laporan keuangan

daerah dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan sedangkan sisanya diterangkan oleh faktor yang lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### **4.4 Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **4.4.1. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, H1 diterima. Karena berdasarkan dari hasil uji yang telah dilakukan dalam variabel sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai signifikansi pada uji parsial diketahui lebih kecil dari 0,05 dan koefisien memiliki nilai sebesar 0,442 , yang artinya semakin besar atau tingginya sistem akuntansi keuangan daerah disetiap SKPD maka mempengaruhi tinggi rendahnya kualitas laporan keuangan.

Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* dimana Informasi tersebut berguna bagi para pengguna (*user*) baik dalam membuat maupun mengevaluasi keputusan ekonomi, serta dijadikan sebagai pertanggungjawaban (*stewardship*) atas alokasi sumber daya yang merupakan amanah bagi mereka. Penelitian ini sejalan dengan (Mokoginta et al., 2021) dengan hasil penelitian penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil yang sama ditunjukkan dari penelitian (Nilawati et al., 2021) dengan hasil Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen. Dan juga penelitian dari (Pujanira & Taman, 2017) Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

DIY. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik dan tepat maka dapat berpengaruh positif dan signifikan.

#### **4.4.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, H2 ditolak. Karena berdasarkan dari hasil uji yang telah dilakukan dalam variabel sistem pengendalian intern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai signifikansi pada uji parsial diketahui lebih besar dari 0,05 dan koefisien memiliki nilai sebesar -0,036 , yang artinya besar atau kecilnya sistem pengendalian intern tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Hal ini tidak sejalan dengan teori stewardship yang mengedepankan kepentingan organisasi, Penerapan sistem pengendalian intern tanpa didukung oleh karyawan atau sumber daya manusia yang memadai, maka tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dikarenakan karyawan akan tetap mencari celah dari penerapan sistem pengendalian intern untuk kepentingan pribadi. Sehingga dia akan membuat laporan keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini sejalan dengan (Mokoginta et al., 2021) dengan hasil penelitian penerapan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh negative signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Maka dapat disimpulkan penerapan sistem pengendalian intern yang kurang baik tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah

#### **4.4.3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas

laporan keuangan daerah, H3 diterima. Karena berdasarkan dari hasil uji yang telah dilakukan dalam variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai signifikan pada uji parsial yang diketahui lebih kecil dari 0,05 dan koefisien memiliki nilai sebesar 0,499 , yang artinya besar atau tingginya kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi tinggi rendahnya kualitas laporan keuangan.

Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* yang didasari dengan psikologi dan sosiologi yang terencana, pengelolaan organisasi difokuskan pada harmonisasi antara pemilik modal (*principles*) dengan pengelola modal (*steward*) dalam mencapai tujuan bersama. Adanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat berfungsi secara baik dan dapat mencapai tujuan organisasi. Penelitian ini sejalan dengan (Mulia, 2019) dengan hasil kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil sama didapatkan (Nilawati et al., 2021) dan juga (Riandani, 2017) Kualitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa jika setiap SKPD memiliki kompetensi sumber daya manusia yang baik maka dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

#### **4.4.4. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, H4 ditolak. Karena berdasarkan dari hasil uji yang telah dilakukan dalam variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai signifikansi pada uji parsial diketahui lebih besar dari 0,05 dan koefisien memiliki nilai sebesar 0,281 , yang artinya semakin

besar atau tingginya pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Hal ini tidak sejalan dengan teori *stewardship* yang menyatakan bahwa terdapat dua kelompok yaitu *principal* dan *steward* yang bekerja sama untuk meningkatkan kualitas sesuai apa yang mereka inginkan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi pemerintah sebagai *steward* dapat memberikan informasi dengan mudah kepada *principal* yaitu memaksimalkan penggunaan internet, *principal* akan lebih mudah mengakses informasi-informasi yang diberikan oleh pemerintah.

Penelitian ini sejalan dengan (Riandani, 2017) dengan hasil Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang sama dilakukan oleh (Sa'adah & Nasrullah, 2021) dengan hasil pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa keterbatasan teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

#### **4.4.5. Pengaruh Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini menyatakan bahwa pengawasan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, H5 ditolak. Karena berdasarkan dari hasil uji yang telah dilakukan dalam variabel pengawasan keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai signifikansi pada uji parsial diketahui lebih besar dari 0,05 dan koefisien memiliki nilai sebesar 0,235 , yang artinya semakin besar atau tingginya pengawasan keuangan maka tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Hal ini tidak sejalan dengan teori *stewardship* yang menyatakan teori *stewardship* sebagai mekanisme pertanggungjawaban untuk dapat

memastikan pemantauan, audit dan pelaporan yang baik agar dapat membantu pencapaian tujuan organisasi, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan sesuai rencana dan dapat menghasilkan kinerja keuangan yang kurang baik yang akan terlihat pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini sejalan dengan (Rosmalita & Nadirsyah, 2020) dengan hasil pengawasan keuangan tidak berpengaruh secara signifikan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Pembahasan atau kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian tentang “Analisis Determinasi Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara” yaitu sebagai berikut :

1. Sistem akuntansi keuangan daerah terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah di kabupaten Jepara. Hal ini menandakan bahwa pegawai/karyawan yang bekerja di SKPD kabupaten Jepara sudah memahami prosedur akuntansi sampai dengan menjadi laporan keuangan sehingga memungkinkan untuk menciptakan kualitas laporan keuangan yang baik.
2. Sistem pengendalian intern terbukti tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di kabupaten Jepara. Hal ini berarti bahwa sistem pengendalian intern di SKPD kabupaten Jepara sudah baik dijalankan namun dalam penerapannya belum efektif dan efisien sehingga kurang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah di SKPD kabupaten Jepara.
3. Kompetensi sumber daya manusia terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah di kabupaten Jepara. artinya bahwa semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
4. Pemanfaatan teknologi informasi terbukti tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di kabupaten Jepara. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

5. Pengawasan keuangan terbukti tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di kabupaten Jepara. Maka dari dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pengawasan keuangan di SKPD Jepara tidak berpengaruh/kurang efektif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Hampir setiap penelitian mendapatkan beberapa kendala baik dalam satu cara atau lainnya dan penelitian ini memang demikian tidak terkecuali. Salah satunya metode ini memiliki batasan inheren seperti salah tafsir atas pertanyaan, kurangnya klarifikasi dan tanggapan yang tidak jujur, ini mungkin terjadi dalam penelitian ini. Termasuk menunggu hasil kuisioner dari masing masing responden keterbatasan memerlukan waktu yang cukup panjang sehingga berimplikasi terhadap penelitian ini.

## **5.3 Saran**

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan semoga akan menghasilkan penelitian yang lebih baik. Beberapa saran yang dapat dituliskan sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya, lebih baik menambah variabel atau merubah variabel dari yang sudah penulis teliti, agar bisa menemukan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah di Jawa Tengah
2. Peneliti selanjutnya diharapkan memilih objek yang lebih menarik untuk diteliti agar dapat menggambarkan dengan jelas factor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah.
3. Peneliti selanjutnya merubah metode sensus yang sudah peneliti teliti untuk menggunakan metode lainnya, sehingga merubah target responden.

## DAFTAR PUSTAKA

- Inayati, & Reuni, S. (2018). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur). *Journal Ilmiah Rinjani*, 6(1), 175–186.
- Irafah, S., Nurmala Sari, E., & Muhyarsyah. (2020). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, peran internal audit, dan kesuksesan penerapan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 337–348.
- Mirawati, M., Nirwana, E., & Hendarsyah, D. (2021). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Satuan Organisasi Perangkat Daerah. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 31–44.  
<https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i1.73>
- Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 56–64.  
<https://doi.org/10.32520/jak.v10i1.1658>
- Mulia, R. A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal EL-RIYASAH*, 9(1), 7.  
<https://doi.org/10.24014/jel.v9i1.6798>
- Nilawati, N., Naz'aina, N., & Haykal, M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 6(2), 60.  
<https://doi.org/10.29103/j-mind.v6i2.5127>
- Oktavia, S., & Rahayu, S. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya, Komitmen Organisasi dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah ( Studi Kasus pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun 2018 ). *E-Proceeding of Management*, 6(1), 652–659.
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16643>
- PURA, R. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *AkMen JURNAL ILMIAH*, 18(1), 1–13.  
<https://doi.org/10.37476/akmen.v18i1.1316>

- Qisthinia, F. A. (2016). Analisis Daya Saing Sektor Basis di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Riandani, R. (2017). Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kab. Limapuluh Kota ). *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 4–28.  
<http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2395>
- richard oliver ( dalam Zeithml., dkk 2018 ). (2021). 濟無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.
- Ridzal, N. A., Sujana, I. W., & Malik, E. (2022). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. In *Owner* (Vol. 6, Issue 3, pp. 2944–2954).  
<https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.882>
- Rosmalita, N., & Nadirsyah, N. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 239–248. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15559>
- Sa'adah, S., & Nasrullah, M. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan. *Journal of Public Accounting (JPA)*, 1(1), 14–24.  
<https://doi.org/10.30591/jpa.v1i1.2614>
- Tawaqal, I., & Suparno. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 02(04), 125–135. <file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/5217-13611-1-PB.pdf>
- Untuk memenuhi sebagian persyaratan Mencapai derajat Sarjana S-, S., Studi Akuntansi, P., & Fajrin Sholichatun, M. (2021). *PENGARUH PENGADAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL TERHADAP MANAGEMENT ACCOUNTING PRACTICE UMKM SEKTOR INDUSTRI MAKANAN DI KOTA SEMARANG SELAMA PANDEMI COVID-19 (Studi pada UMKM di Kota Semarang)*. 19.